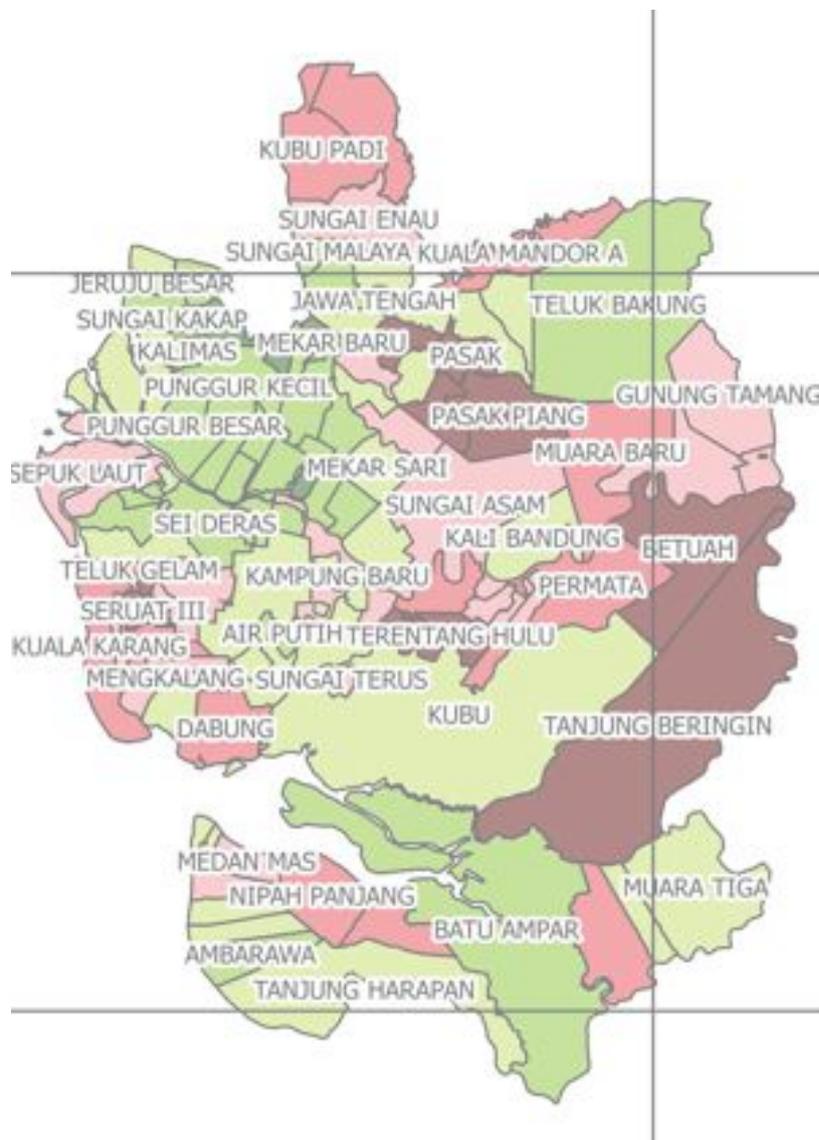


# F S V A

## Food Security and Vulnerability Atlas Kabupaten Kubu Raya



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022



## SAMBUTAN BUPATI KUBU RAYA



Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Dalam Undang-Undang Pangan ini menekankan pada pemenuhan pangan ditingkat perorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kerifan lokal secara bermartabat. Tanggung jawab Pemerintah adalah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, seimbang dan terjangkau.

Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat bertanggung jawab dan berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan perlindungan bagi orang perseorangan yang mengkonsumsi pangan. Dalam rangka mewujudkan tanggungjawab Pemerintah tersebut, maka penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten level desa se-Kabupaten Kubu Raya menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya yang telah melaksanakan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Kubu Raya secara komprehensif, yang telah menggambarkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan mulai dari kondisi rawan pangan sampai pada yang tahan pangan untuk setiap indikator ketahanan pangan seperti tingkat ketersediaan, akses, pemanfaatan dan kerentanan pangan pada level desa se Kabupaten Kubu Raya.

Dengan adanya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten akan lebih mudah untuk membuat prioritas kebijakan, program dan kegiatan operasional untuk mengatasi masalah pangan di daerah, serta lebih memudahkan menentukan langkah awal dan menentukan solusi akhir dari gerakan mengatasi masalah ketahanan pangan yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya. Keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan ketahanan pangan beberapa tahun terakhir dapat diukur dari berkurangnya jumlah masyarakat rawan pangan di Kubu Raya dalam hal ini membuktikan bahwa kerjasama Pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah ketahanan pangan telah berlangsung dengan baik dan perlu diteruskan dan ditingkatkan, sehingga kedepan saya berharap kerjasama yang

berjalan dapat ditingkatkan dalam rangka meningkatkan peran aktif secara bersama-sama dalam menciptakan ketahanan pangan Kabupaten Kubu Raya.

Akhirnya perkenankan saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan level desa se-Kabupaten Kubu Raya. Mari kita tingkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Kubu Raya, agar tercipta sumber daya manusia yang bahagia, cerdas, dan berkualitas sehingga mampu mengakselerasikan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

Sungai Raya, November 2022

Bupati Kubu Raya



H. MUDA MAHENDRAWAN, S.H.

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, maka disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional, FSVA disusun sejak tahun 2002 melalui kerja sama dengan *World Food Programme* (WFP). Pada tahun 2005, kerjasama tersebut menghasilkan Peta Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Atlas* (FIA). Pada tahun 2009, 2015, 2018, dan 2019, disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional, disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat berdasarkan cakupan wilayahnya. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten sejak tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya melalui Publikasi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 menyediakan informasi mengenai situasi ketahanan dan kerentanan yang bisa menyebabkan kerawanan pangan di Kabupaten Kubu Raya. Hasil dari analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan level desa dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan antisipasi dan penanganan wilayah-wilayah desa untuk dijadikan target lokasi intervensi ketahanan pangan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Sungai Raya, November 2022  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Kubu Raya



Drs. Heri Supriyanto, M.Si

## RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kabupaten/Kota merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah kelurahan. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah kelurahan. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten/Kota.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (3) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk; (4) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (5) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; (6) Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.
5. Desa diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi **Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang**, dan **Prioritas 3 rentan pangan rendah**. Kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan

rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

6. Berdasarkan hasil analisis tersebut secara komposit, dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Sebanyak 10 Desa masuk dalam Prioritas 1 yakni :
    - Desa Tanjung Beringin (Kecamatan Batu Ampar),
    - Desa Sungai Dungun, Desa Terentang Hulu, Desa Betuah (Kecamatan Terentang),
    - Desa Seruat III dan Desa Sepakat Baru (Kecamatan Kubu )
    - Desa Simpang Kanan, Desa Bengkarek, Desa Pasak Piang dan Desa Pasak (Kecamatan Sungai Ambawang)
  - b. Sebanyak 19 Desa masuk dalam Prioritas 2 yakni :
    - Desa Nipah Panjang, Desa Teluk Nibung, Desa UPT Sui Kerawang (Kecamatan Batu Ampar),
    - Desa Teluk Bayur, Desa Permata, Desa Radak Baru (Kecamatan Terentang),
    - Desa Dabung, Desa Seruat II (Kecamatan Kubu),
    - Desa Sungai Nibung, Desa Kuala Karang, Desa Tanjung Bunga, Desa Teluk Gelam (Kecamatan Teluk Pakedai),
    - Desa Kuala Mandor A, Desa Kubu Padi, Desa Retok, Desa Persiapan Padi Jaya, Desa Persiapan Sungau Enau A (Kecamatan Kuala Mandor B)
  - c. Sebanyak 25 Desa masuk dalam Prioritas 3 yakni.
    - Desa Tasik Malaya dan Desa Medan Mas (Kecamatan Batu Ampar),
    - Desa Teluk Empening, Desa Terentang Hilir, Desa Sungai Radak I dan Desa Sungai Radak II ( Kecamatan Terentang)
    - Desa Sungai Terus, Desa Kampung Baru, Desa Sungai Bemban, Desa Sungai Selamat, Desa Mengkalang dan Desa Persiapan Bemban Timur ( Kecamatan Kubu),
    - Desa Seruat I, Desa Teluk Pakedai I, Desa Pasir Putih (Kecamatan Teluk Pakedai)
    - Desa Sepuk Laut (Kecamatan Sungai Kakap)
    - Desa Tebang Kacang, Desas Sungai Asam, Desa Pulau Limbung, Desa Gunung Tamang, Desa Madu Sari, Desa Pulau Jambu, Desa Persiapan Suku Lanting (Kecamatan Sungai Raya)
    - Desa Persiapan Simpang Raya (Kecamatan Sungai Ambawang)
    - Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B)
  - d. Sebanyak 34 Desa masuk dalam Prioritas 4 yakni.
    - 7 Desa ( Kecamatan Batu Ampar)
    - 9 Desa ( Kecamatan Kubu)
    - 2 Desa ( Kecamatan Teluk Pakedai)
    - 4 Desa (Kecamatan Sungai Kakap)

- 4 Desa (Kecamatan Sungai Raya)
  - 7 Desa (Kecamatan Sungai Ambawang)
  - 1 Desa (Kecamatan Kuala Mandor B)
- e. Sebanyak 35 Desa masuk dalam Prioritas 5 yakni.
- 2 Desa ( Kecamatan Batu Ampar)
  - 2 Desa ( Kecamatan Kubu)
  - 5 Desa ( Kecamatan Teluk Pakedai)
  - 9 Desa (Kecamatan Sungai Kakap)
  - 6 Desa (Kecamatan Sungai Raya)
  - 6 Desa (Kecamatan Sungai Ambawang)
  - 5 Desa (Kecamatan Rasau Jaya)
- f. Sebanyak 5 Desa masuk dalam Prioritas 6 yakni.
- 1 Desa (Kecamatan Sungai Kakap)
  - 3 Desa (Kecamatan Sungai Raya)
  - 1 Desa (Kecamatan Rasau Jaya)
7. Sumber Data Dalam Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan:
- a. Luas Lahan Pertanian Sumber Data LP2B Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya.
  - b. Sarana dan Prasarana Sumber Data Potensi Desa Tahun 2021 yang telah diolah oleh Badan Ketahanan Pangan.
  - c. Penduduk Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Sumber Data Kelompok Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Triwulan IV Tahun 2020 & 2021 Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.
  - d. Desa Tanpa Akses Penghubung Memadai Sumber Data Potensi Desa Tahun 2021 yang telah diolah oleh Badan Ketahanan Pangan.
  - e. Jumlah Tangga Tanpa Akses Air Bersih sumber data Terpadu PPFM-SK Januari 2019.
  - f. Jumlah Tenaga Kesehatan Sumber Data Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
  - g. Jumlah Penduduk data AGREGAT-SEM-2-2021 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.
  - h. Jumlah Rumah Tangga sumber data AGREGAT-SEM-2-2021 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.
  - i. Tingkat Kepadatan Penduduk sumber data AGREGAT-SEM-2-2021 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.
  - j. Catatan untuk Desa Persiapan menggunakan Data Desa Induk.**

8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan diarahkan pada kegiatan:
- A. Mengatasi masalah ketersediaan pangan, diantaranya :
    - a. Meningkatkan kapasitas produksi per satuan luas lahan, antara lain dengan meningkatkan indeks pertanaman.
    - b. Mengembangkan potensi lahan pertanian non sawah.
    - c. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana khususnya tanaman pangan.
    - d. Mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan dengan aneka tanaman umbi-umbian dan sayuran.
    - e. Penguatan cadangan pangan daerah.
    - f. Peningkatan diversifikasi pangan.
    - g. Melakukan pemantauan harga dan stok pangan dalam upaya menjaga stabilitas ketersediaan pangan.
  - B. Mengatasi masalah akses pangan, diantaranya :
    - a. Penyediaan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran.
    - b. Pengembangan usaha kreatif, terutama di sektor informal, UMKM, padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
    - c. Mempermudah akses pangan, diantaranya melalui operasi pasar di titik-titik lokasi terindikasi potensi rawan pangan.
    - d. Jaringan pengaman sosial rumah tangga miskin, diantaranya efektifitas cakupan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program sosial lainnya.
  - C. Mengatasi masalah infrastruktur (air bersih), diantaranya :
    - a. Peningkatan infrastruktur dasar air bersih, dengan memperluas jaringan air bersih PDAM.
    - b. Memberikan subsidi bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan fasilitasi pemasangan instalasi air bersih.
  - D. Mengatasi masalah kesehatan dan gizi, diantaranya :
    - a. Memperkuat sistem peringatan dini kewaspadaan pangan dan gizi.
    - b. Memperkuat mitigasi kerawanan pangan dan gizi.
    - c. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan pangan dan gizi.
    - d. Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan di setiap kecamatan.
    - e. Meningkatkan fasilitas kesehatan di setiap kecamatan.

## DAFTAR ISI

	Hal
SAMBUTAN BUPATI .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi .....	3
1.3 Metodologi.....	6
<b>BAB II KETERSEDIAAN PANGAN .....</b>	<b>11</b>
2.1 Lahan Pertanian .....	12
2.2 Produksi Pertanian.....	14
2.3 Sarana dan Prasarana Ekonomi .....	20
2.4 Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan .....	22
<b>BAB III AKSES PANGAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah.....	25
3.2 Akses Transportasi .....	28
3.3 Strategi Peningkatan Akses Pangan.....	31
<b>BAB IV PEMANFAATAN PANGAN .....</b>	<b>32</b>
4.1 Akses Terhadap Air Bersih .....	32
4.2 Rasio Tenaga Kesehatan .....	35
4.3 Dampak (Outcome) dari Status Kesehatan.....	38
4.4 Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan .....	39

<b>BAB V KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT .....</b>	<b>44</b>
5.1 Kondisi Ketahanan Pangan.....	44
5.2 Faktor Penyebab Kerentanan Pangan .....	49
<b>BAB VI REKOMENDASI KEBIJAKAN .....</b>	<b>52</b>

**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi.....	9
Gambar 2.1 Rasio Lahan Sawah Terhadap Total Lahan.....	13
Gambar 2.2 Rasio Jumlah Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga .....	21
Gambar 3.1 Rasio Jumlah Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Terhadap Jumlah Penduduk Desa.....	27
Gambar 3.2 Desa yang Tidak Memiliki Akses Penghubung Memadai Melalui Darat, Air, dan Udara .....	30
Gambar 4.1 Rasio Jumlah Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Terhadap Jumlah Rumah Tangga Desa .....	34
Gambar 4.2 Rasio Jumlah Penduduk Desa Terhadap Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk.....	37
Gambar 5.1 Sebaran Jumlah Desa Prioritas 1 Berdasarkan Indeks Komposit.....	45
Gambar 5.2 Sebaran Jumlah Desa Prioritas 2 Berdasarkan Indeks Komposit.....	46
Gambar 5.3 Sebaran Jumlah Desa Prioritas 3 Berdasarkan Indeks Komposit.....	47
Gambar 5.4 Prioritas Komposit.....	48
Gambar 6.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan.....	53

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Indikator FSVA Kabupaten 2022 .....	6
Tabel 2.1 Sebaran Rasio Luas Baku Lahan Sawah Terhadap Total Lahan Berdasarkan Prioritas .....	12
Tabel 2.2 Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian 2017-2022 (Ton) .....	14
Tabel 2.3 Produksi Total Serealia per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi (2017-2021) .....	15
Tabel 2.4 Produksi Padi 2017 - 2021 (Ton) .....	16
Tabel 2.5 Produksi Jagung 2017 - 2021 (Ton) .....	17
Tabel 2.6 Produksi Ubi Kayu 2017 - 2021 (Ton).....	18
Tabel 2.7 Produksi Ubi Jalar 2017 - 2021 (Ton) .....	19
Tabel 2.8 Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Indeks Prioritas.....	20
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kubu Raya 2017 – 2021 .....	25
Tabel 3.2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kubu Raya 2017 – 2021 .....	25
Tabel 3.3 Sebaran Desa Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Indeks Prioritas .....	25
Tabel 4.1 Sebaran Desa Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Indeks Prioritas.....	33
Tabel 4.2 Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan Di Desa Berdasarkan Indeks Prioritas ..	36
Tabel 4.3 Penderita Gizi Buruk 2017-2021 .....	38
Tabel 4.4 Jumlah Kematian Bayi Dan Balita Per Kecamatan Tahun 2021 .....	39
Tabel 5.1 Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Indeks Prioritas .....	44
Tabel 5.2 Faktor Penyebab Kerentanan Pangan Prioritas 1 .....	49
Tabel 5.3 Faktor Penyebab Kerentanan Pangan Prioritas 2 .....	50
Tabel 5.4 Faktor Penyebab Kerentanan Pangan Prioritas 3 .....	51

## DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 2.1 Sebaran Rasio Luas Baku Lahan Sawah Terhadap Total Lahan Berdasarkan Indeks Prioritas.....	12
Grafik 2.2 Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian 2017-2022 (Ton) .....	14
Grafik 2.3 Produksi Total Serealia per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi (2017-2021) .....	15
Grafik 2.4 Produksi Padi 2017 - 2021 (Ton) .....	16
Grafik 2.5 Produksi Jagung 2017 - 2021 (Ton) .....	17
Grafik 2.6 Produksi Ubi Kayu 2017 - 2021 (Ton).....	18
Grafik 2.7 Produksi Ubi Jalar 2017 - 2021 (Ton) .....	19
Grafik 2.8 Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Indeks Prioritas .....	20
Grafik 3.1 Sebaran Desa Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Indeks Prioritas .....	26
Grafik 4.1 Sebaran Desa Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Indeks Prioritas .....	33
Grafik 4.2 Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan Di Desa Berdasarkan Indeks Prioritas .	35
Grafik 4.3 Penderita Gizi Buruk 2016 – 2021.....	39
Grafik 4.4 Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan .....	40

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 kecamatan dan 128 desa dengan total penduduk sebesar 615.125 jiwa (BPS, 2022). Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 39 pulau-pulau kecil yang semuanya berpenghuni yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Secara geografis terletak memanjang dari utara ke selatan di antara 109° 02' 19,32"- 109° 58' 32.16" Bujur Timur dan memanjang dari barat ke timur di antara 0° 13' 40,83" Lintang Utara - 1° 00' 53,09" Lintang Selatan. Kabupaten Kubu Raya di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, dan Kabupaten Landak, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sanggau, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna yang memiliki wilayah daratan seluas 4.785 km<sup>2</sup> atau 478.500 ha dan wilayah perairan (laut) diperkirakan seluas 2.197 km<sup>2</sup> atau 219.700 ha. Secara klimatologis, Kabupaten Kubu Raya memiliki iklim tipe A, yaitu iklim sangat basah dengan curah hujan bulanan diatas 100 mm dengan total curah hujan tahunan rata-rata berkisar 3.000 mm.

Perekonomian Kabupaten Kubu Raya tergantung pada sektor industri pengolahan yang masih mempunyai peranan tinggi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Akan tetapi sektor ini tahun 2021 menurun/meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, di mana tahun 2021 peranannya naik dari 33,95% menjadi 35,30%. Kenaikan ini disebabkan semua sub sektor yang ada dalam sektor industri pengolahan mengalami kenaikan peranan. Selain sektor industri pengolahan, sektor yang mengalami kenaikan tahun 2021 adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu dari 13,09% menjadi 13,15%; sektor konstruksi dari 11,80% menjadi 12,10%; dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dari 1,51% menjadi 1,55%. Sementara sektor lainnya mengalami penurunan. Sektor transportasi dan perdagangan menunjukkan peranan sebesar 6,99%, sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 1,29%, sektor real estat sebesar 2,87%, sektor jasa perusahaan sebesar 0,37%, dan sektor jasa pendidikan sebesar 3,62%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih sangat banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan para pemegang kepentingan (stakeholder) dalam melakukan pembangunan.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi

Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2022.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA

Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

## 1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

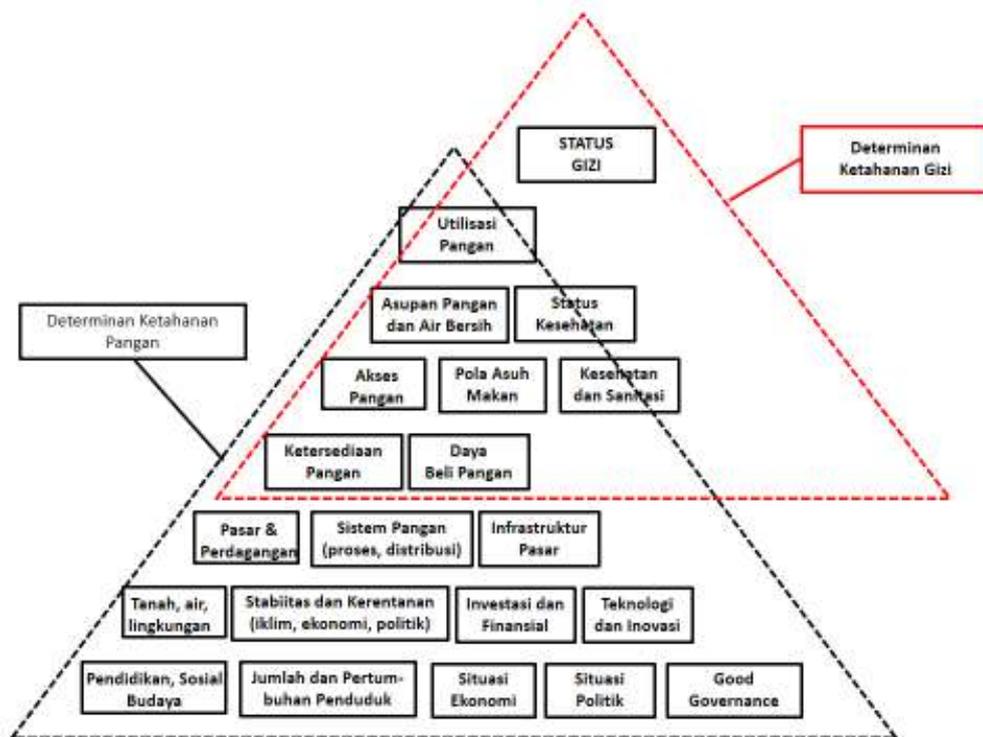
Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO<sup>1</sup> mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

tahun 2013<sup>2</sup> juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi  
(Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

<sup>2</sup> Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York

**Ketersediaan pangan** adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

**Akses pangan** adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

**Pemanfaatan pangan** merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

**Dampak gizi dan kesehatan** merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistim kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

**Kerawanan pangan transien** adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

### 1.3. Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

#### Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

**Tabel 1.1 Indikator FSVA Kabupaten 2022**

Indikator	Definisi	Sumber Data
<b>A. Aspek Ketersediaan Pangan</b>		
Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	Luas baku lahan sawah dibandingkan luas wilayah desa	BPS; Pusat Data Informasi Kementan 2018

Indikator	Definisi	Sumber Data
Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Potensi Desa 2018, BPS Jumlah Rumah Tangga 2018 dari Proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010
<b>B. Aspek Akses terhadap Pangan</b>		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk desa	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (SK.71/2018) Jumlah Rumah Tangga 2018 dari Proyeksi SP 2010
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	Potensi Desa 2018, BPS
<b>C. Aspek Pemanfaatan Pangan</b>		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (SK.71/2018)
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk desa	Potensi Desa 2018, BPS Jumlah penduduk 2018 dari Proyeksi SP 2010

## Metode Analisis

### 1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

### 2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit (EIU)* dalam penyusunan *Global Food Security Index (EIU 2016 dan 2017)* dan *International Food Policy Research Institute (IFPRI)* dalam penyusunan *Global Hunger Index (IFPRI 2017)*. Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

$Y_j$  : Skor komposit kabupaten/kota ke-j

$a_i$  : Bobot masing-masing indikator

$X_{ij}$  : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

**Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu**

No	Indikator	Bobot
1.	Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	1/6
<b>Sub Total</b>		<b>1/3</b>
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai	1/6
<b>Sub Total</b>		<b>1/3</b>
5	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6
8	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6
<b>Sub Total</b>		<b>1/3</b>

- c. Mengelompokkan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 a_i C_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

$K_j$ : *cut off point* komposit ke-J

$a_i$ : Bobot indikator ke-i

$C_{ij}$ : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua

kpenduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

### **3. Pemetaan**

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

## BAB 2

### KETERSEDIAAN PANGAN



Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

## 2.1. LAHAN PERTANIAN

Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah kabupaten adalah perbandingan antara luas baku lahan sawah dengan luas wilayah desa. Rasio lahan sawah terhadap luas wilayah desa digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan sawah memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan sawah terhadap luas wilayah desa maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dari 128 desa di Kabupaten Kubu Raya, 21 desa masuk dalam prioritas 1 (16,41%), 29 desa prioritas 2 (22,66%) dan 19 desa prioritas 3 (14,84%). Kecamatan yang memiliki rasio lahan prioritas 1-3 sebagian besar tersebar di Kecamatan Sungai Ambawang yaitu sebanyak 14 desa

Grafik 2.1 Sebaran Rasio Luas Baku Lahan Sawah Terhadap Total Lahan Berdasarkan Indeks Prioritas



Tabel 2.1 Sebaran Rasio Luas Baku Lahan Sawah Terhadap Total Lahan Berdasarkan Prioritas

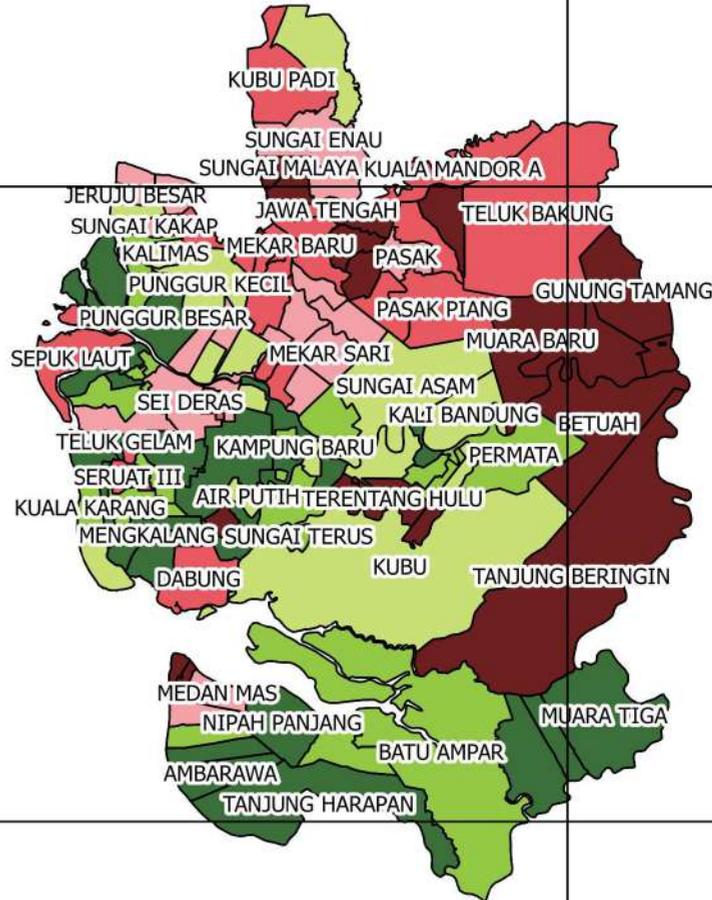
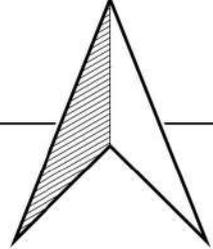
Prioritas	Rasio lahan sawah	Jumlah Desa	Persentase
1	$\leq 0,0025$	21	16,41%
2	0,0025 – 0,0205	29	22,66%
3	0,0205 – 0,0505	19	14,84%
4	0,0505 – 0,0978	17	13,28%
5	0,0978 – 0,1523	19	14,84%
6	$>0,1523$	23	17,97%

# PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN RASIO LAHAN BAKU SAWAH TERHADAP TOTAL LAHAN KABUPATEN KUBU RAYA - TAHUN 2022

108.900

109.800

N



0.000

0.060

25 0 25 50 75 100 km



108.900

109.800



**DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA**



## Legenda

□ FSVA - KUBU RAYA

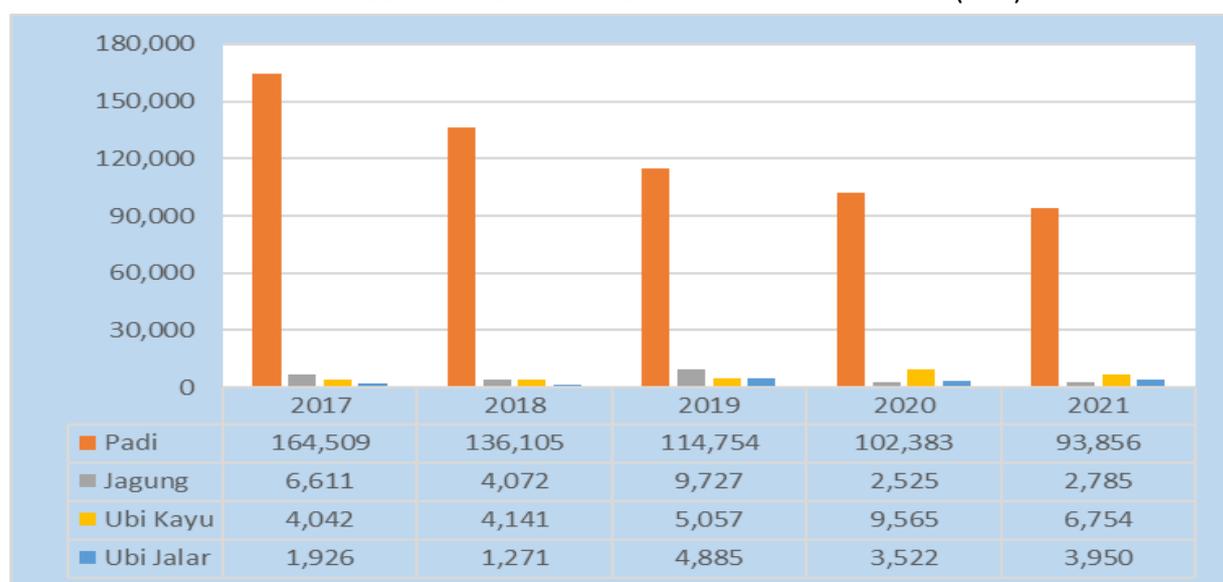
KETERANGAN :

- PRIORITAS 1
- PRIORITAS 2
- PRIORITAS 3
- PRIORITAS 4
- PRIORITAS 5
- PRIORITAS 6

## 2.2. PRODUKSI PERTANIAN

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 13,15% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2021 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Padi dan jagung merupakan bahan pokok di Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan Tabel 2.2 dan Gambar 2.1, produksi umbi-umbian di Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan sejak tahun 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya luas tanam dan peningkatan produktivitas. Produksi padi mengalami penurunan selama 5 tahun, yaitu dari pencapaian produksi 164.509 ton tahun 2017 menjadi 93.856 pada tahun 2022.

Grafik 2.2 Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian 2017-2022 (Ton)



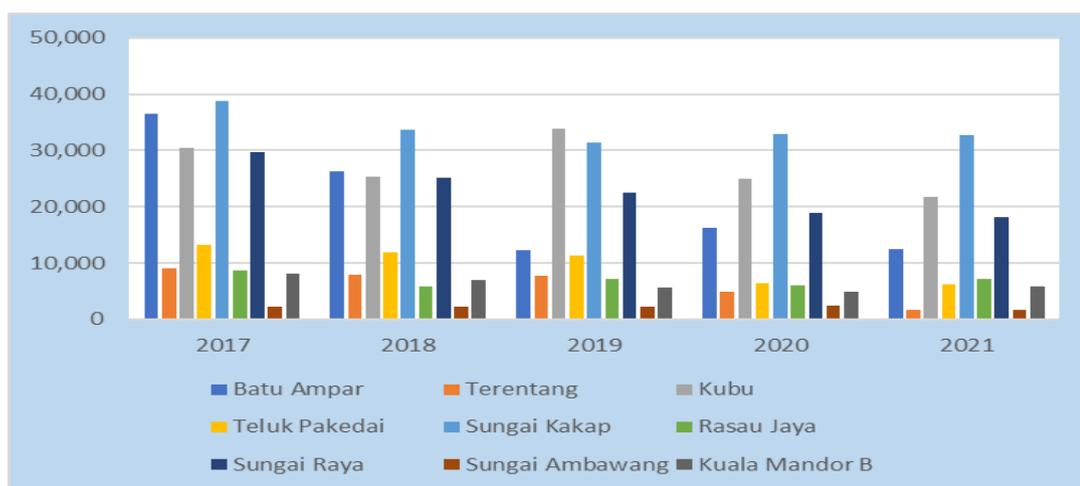
Tabel 2.2 Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian 2017-2022 (Ton)

Serealia	2017	2018	2019	2020	2021
Padi	164.509	136.105	114.754	102.383	93.856
Jagung	6.611	4.072	9.727	2.525	2.785
Ubi Kayu	4.042	4.141	5.057	9.565	6.754
Ubi Jalar	1.926	1.271	4.885	3.522	3.950

Sumber: Bidang Tanaman Pangan DKPP KKR, 2022.

Tahun 2021, total produksi sereal dan umbi-umbian mencapai 93.856 ton padi, 2.785 ton jagung, 6.754 ton ubi kayu, dan ubi jalar 3.950 ton. Total produksi sereal menunjukkan penurunan, yaitu dari total produksi tahun 2017 sebesar 179.105 ton menjadi 109.366 ton pada tahun 2021. Produksi sereal pertahun dan laju pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Grafik 2.3 Produksi Total Sereal per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi (2017-2021)



Tabel 2.3 Produksi Total Sereal per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi (2017-2021)

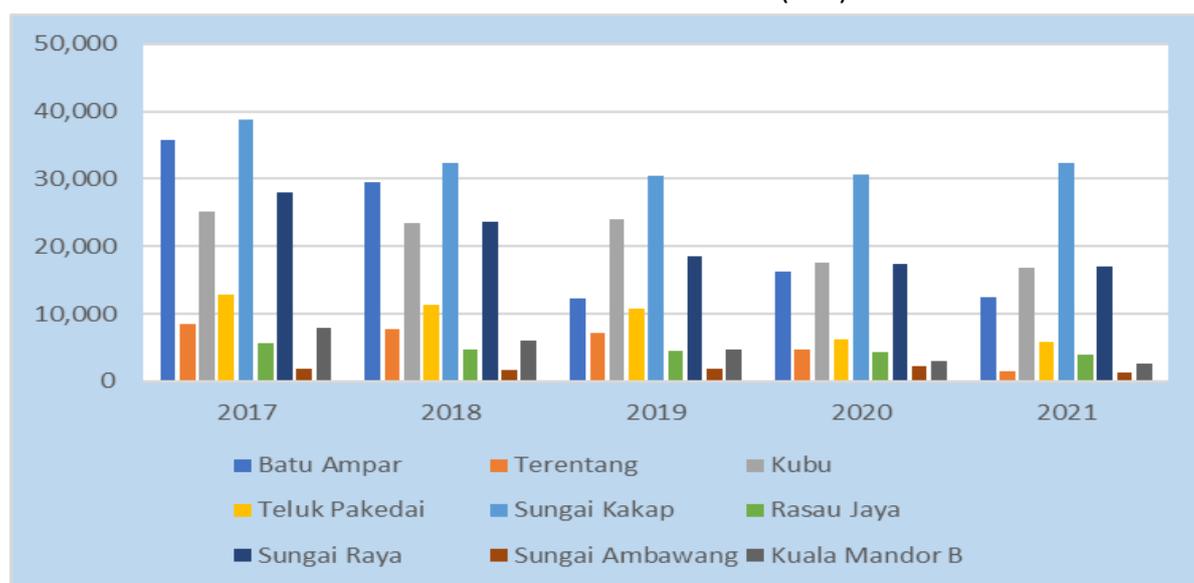
No	Kecamatan	Produksi Total Sereal				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Batu Ampar	36.604	26.374	12.319	16.343	12.458
2	Terentang	8.997	8.015	7.765	4.851	1.599
3	Kubu	30.525	25.389	33.867	24.998	21.662
4	Teluk Pakedai	13.310	11.944	11.292	6.486	6.185
5	Sungai Kakap	38.817	33.690	31.409	32.925	32.778
6	Rasau Jaya	8.603	5.842	7.200	6.093	7.136
7	Sungai Raya	29.804	25.090	22.606	18.969	18.086
8	Sungai Ambawang	2.229	2.175	2.277	2.479	1.663
9	Kuala Mandor B	8.200	7.069	5.688	4.850	5.779
<b>Total</b>		<b>177.089</b>	<b>145.589</b>	<b>134.422</b>	<b>117.995</b>	<b>107.344</b>

Sumber: Bidang Tanaman Pangan DKPP KKR, 2022.

## Padi

Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Kubu Raya selama 5 tahun terakhir (2017-2021) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 2.4. Produksi padi mengalami penurunan pada tahun 2021 di 8 kecamatan. Peningkatan terjadi di Kecamatan Sungai Kakap. Produksi padi tertinggi di Kecamatan Sungai Kakap sebesar 38.817 ton pada tahun 2017.

Grafik 2.4 Produksi Padi 2017 - 2021 (Ton)



Tabel 2.4 Produksi Padi 2017 - 2021 (Ton)

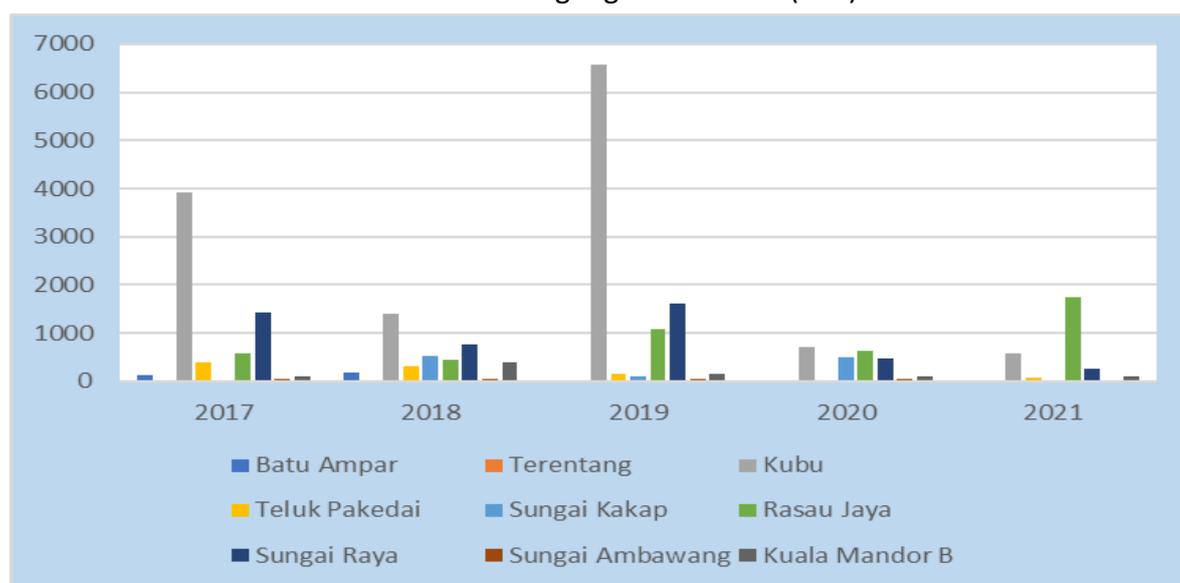
Kecamatan	Padi				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Batu Ampar	35.710	29.490	12.319	16.343	12.458
2. Terentang	8.533	7.654	7.209	4.627	1.475
3. Kubu	25.185	23.495	24.047	17.658	16.878
4. Teluk Pakedai	12.812	11.409	10.839	6.289	5.860
5. Sungai Kakap	38.817	32.376	30.501	30.616	32.376
6. Rasau Jaya	5.745	4.716	4.570	4.233	3.963
7. Sungai Raya	27.960	23.729	18.529	17.463	16.957
8. Sungai Ambawang	1.817	1.738	1.949	2.230	1.235
9. Kuala Mandor B	7.931	6.047	4.791	2.924	2.655
<b>Jumlah</b>	<b>164.509</b>	<b>136.105</b>	<b>114.754</b>	<b>102.383</b>	<b>93.856</b>

Sumber: Bidang Tanaman Pangan DKPP KKR, 2022.

## Jagung

Pada tahun 2021, produksi jagung mencapai 2.785 ton. Sebaran produksi jagung terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 9.727 ton. Kontribusi terbesar terjadi di Kecamatan Kubu sebesar 6.567 ton, menyusul Kecamatan Sungai Raya sebesar 1.602 ton dan terendah Kecamatan Batu Ampar sebesar 0 ton. Secara rinci produksi jagung tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.5.

Grafik 2.5 Produksi Jagung 2017 - 2021 (Ton)



Tabel 2.5 Produksi Jagung 2017 - 2021 (Ton)

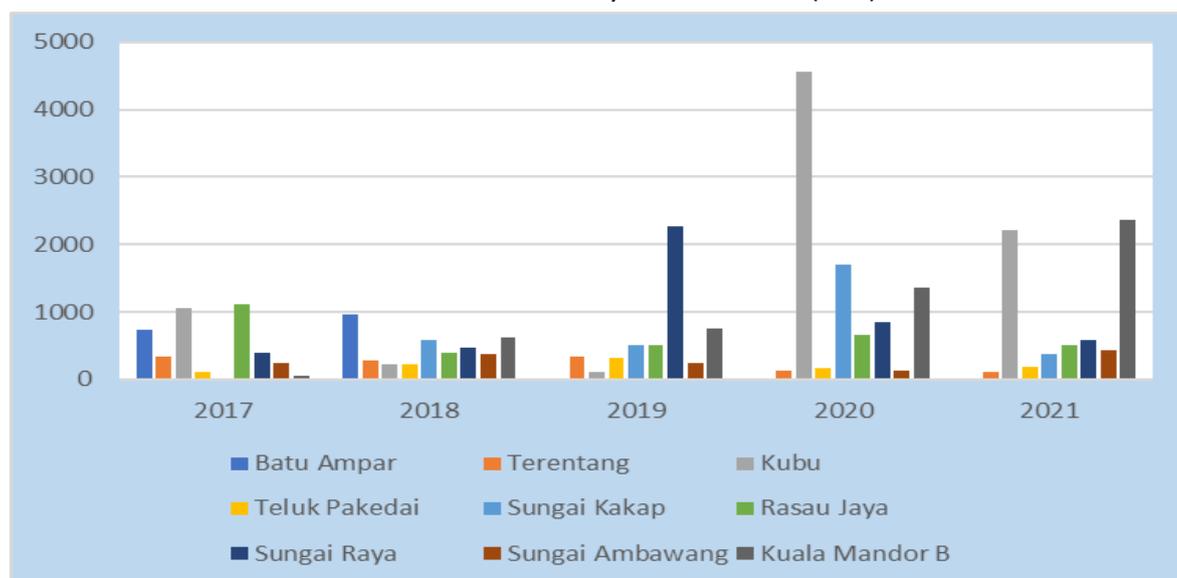
Kecamatan	Jagung				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Batu Ampar	119	173	0	0	0
2. Terentang	24	6	16	18	0,3
3. Kubu	3.911	1.413	6.567	701	567
4. Teluk Pakedai	395	317	142	34	62
5. Sungai Kakap	0	521	102	498	31
6. Rasau Jaya	576	440	1.091	641	1.752
7. Sungai Raya	1.423	754	1.602	476	272
8. Sungai Ambawang	59	58	57	43	3
9. Kuala Mandor B	104	391	150	114	99
<b>Jumlah</b>	<b>6.611</b>	<b>4.072</b>	<b>9.727</b>	<b>2.525</b>	<b>2.785</b>

Sumber: Bidang Tanaman Pangan DKPP KKR, 2022.

## Ubi Kayu

Produksi ubi kayu meningkat dari 4.042 ton pada tahun 2017 menjadi 6.754 ton pada tahun 2021. Daerah yang merupakan sentra produksi ubi kayu terbesar pada tahun 2021 adalah kecamatan Kuala Mandor B. Rincian produksi ubi kayu tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.6.

Grafik 2.6 Produksi Ubi Kayu 2017 - 2021 (Ton)



Tabel 2.6 Produksi Ubi Kayu 2017 - 2021 (Ton)

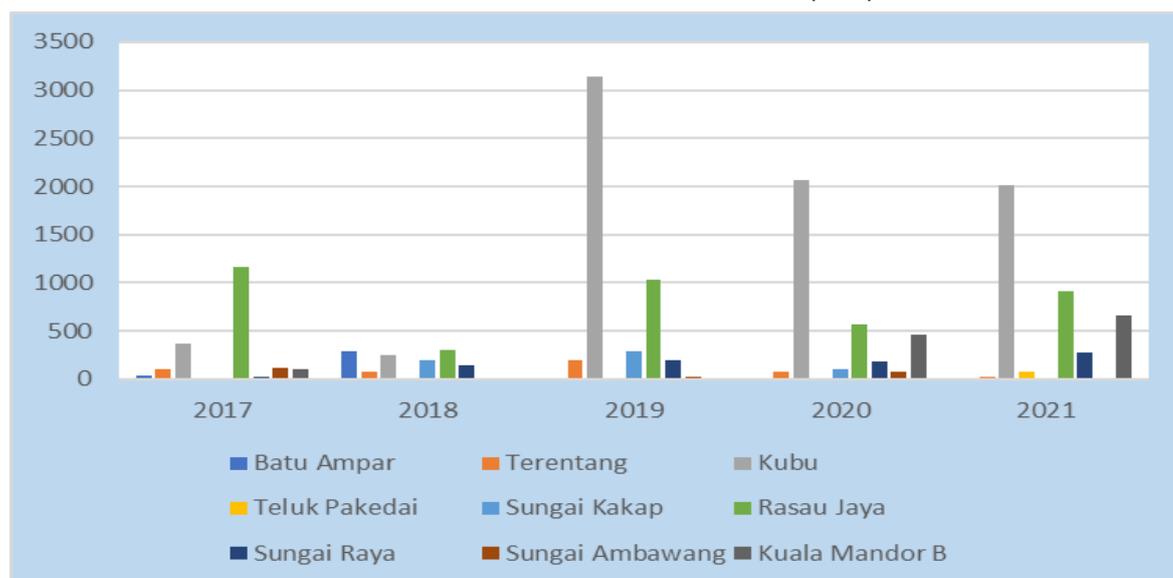
Kecamatan	Ubi Kayu				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Batu Ampar	736	971	0	0	0
2. Terentang	339	275	342	135	106
3. Kubu	1.060	227	109	4.566	2.206
4. Teluk Pakedai	103	218	311	162	186
5. Sungai Kakap	0	591	513	1.706	371
6. Rasau Jaya	1.112	387	510	653	515
7. Sungai Raya	398	469	2.277	853	584
8. Sungai Ambawang	236	372	249	135	425
9. Kuala Mandor B	59	631	746	1.354	2.362
<b>Jumlah</b>	<b>4.042</b>	<b>4.141</b>	<b>5.057</b>	<b>9.565</b>	<b>6.754</b>

Sumber: Bidang Tanaman Pangan DKPP KKR, 2021

## Ubi Jalar

Produksi ubi jalar terbesar selama kurun waktu 5 tahun (2017 - 2021) terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 3.522 ton. Tahun 2021 Kecamatan Kubu merupakan penyumbang terbesar, yaitu sebesar 2.010 ton, Kecamatan Rasau Jaya sebesar 907 ton, Kecamatan Kuala Mandor B sebesar 664 ton dan Kecamatan Sungai Raya sebesar 273 ton. Rincian produksi ubi jalar tahun 2017 - 2021 disajikan pada Tabel 2.7.

Grafik 2.7 Produksi Ubi Jalar 2017 - 2021 (Ton)



Tabel 2.7 Produksi Ubi Jalar 2017 - 2021 (Ton)

Kecamatan	Ubi jalar				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Batu Ampar	39	291	0	0	0
2. Terentang	102	80	197	71	18
3. Kubu	368	254	3.144	2.073	2.010
4. Teluk Pakedai	0	0	0	0	78
5. Sungai Kakap	0	203	294	106	0
6. Rasau Jaya	1.170	299	1.029	567	907
7. Sungai Raya	24	137	197	177	273
8. Sungai Ambawang	118	7	22	71	0
9. Kuala Mandor B	106	0	0	459	664
<b>Jumlah</b>	<b>1.926</b>	<b>1.271</b>	<b>4.885</b>	<b>3.522</b>	<b>3.950</b>

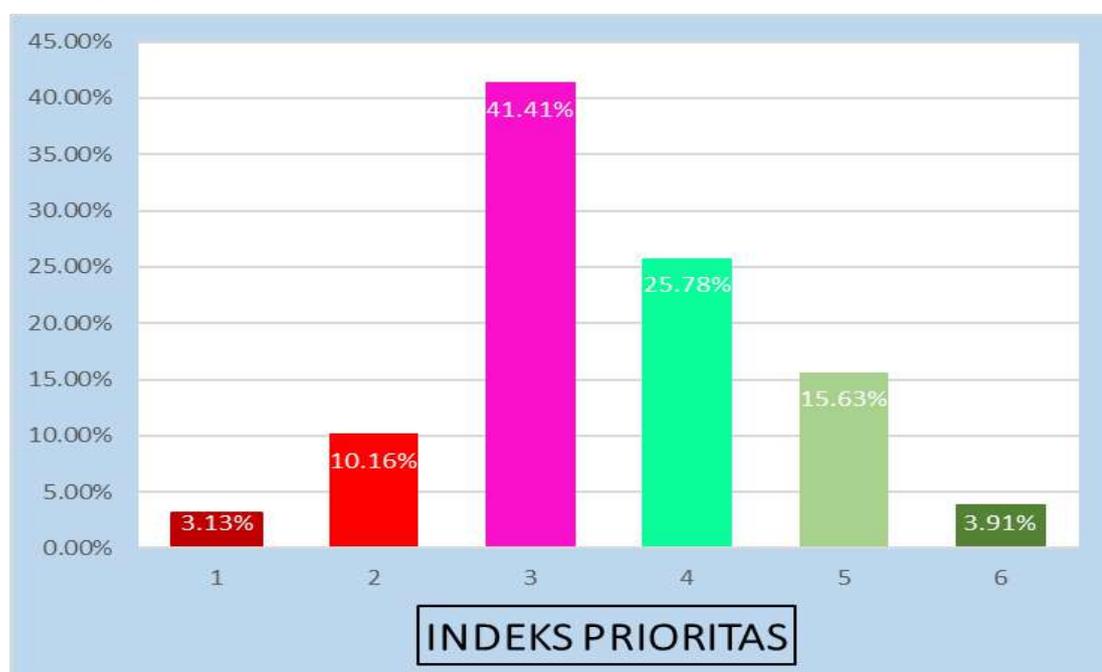
Sumber: Bidang Tanaman Pangan DKPP KKR, 2022.

### 2.3. SARANA DAN PRASARANA EKONOMI

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

Dari 128 desa di Kabupaten Kubu Raya, 4 desa masuk dalam prioritas 1 (3,13%), 13 desa prioritas 2 (10,16%) dan 53 desa prioritas 3 (41,41%).

Tabel 2.8 Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Indeks Prioritas



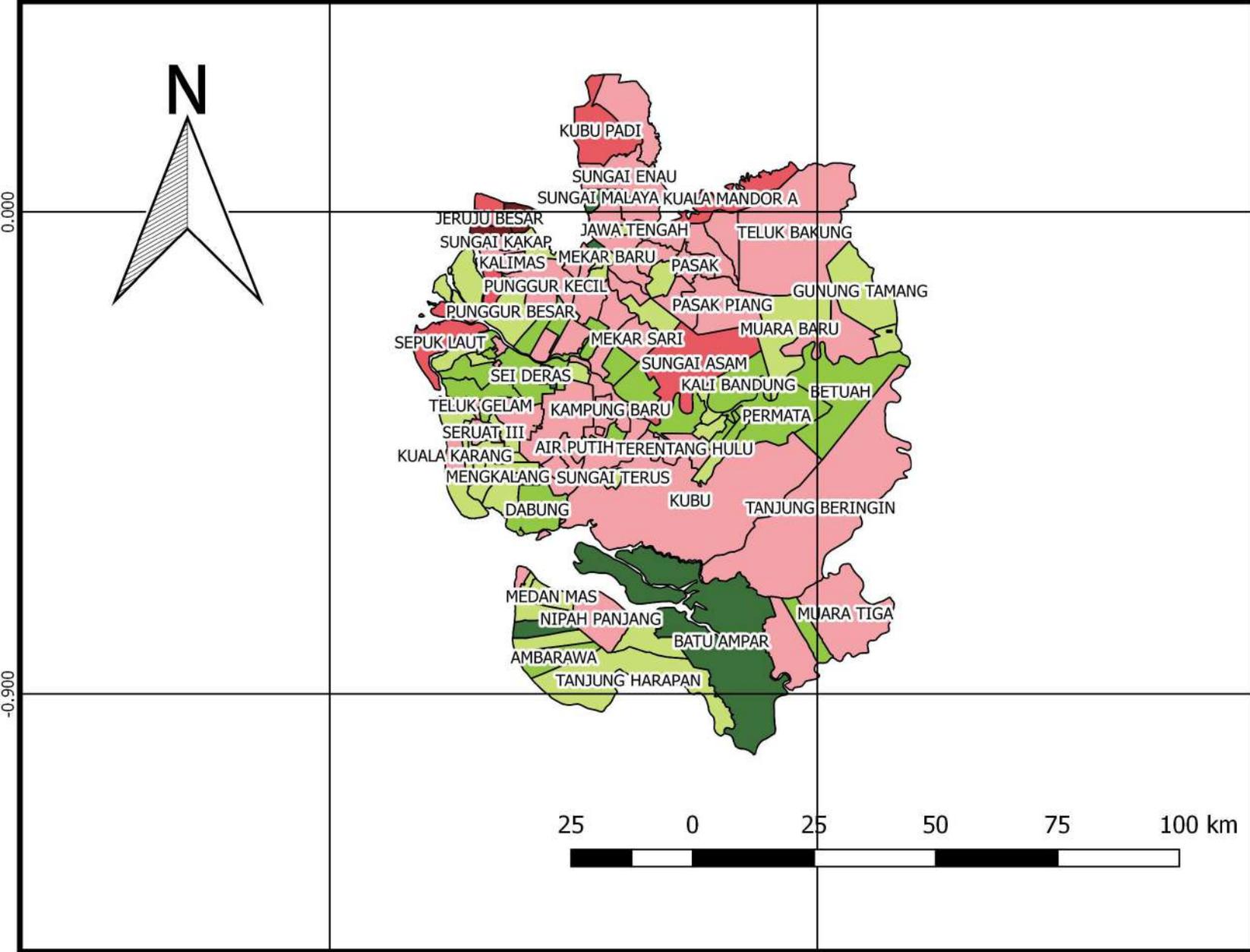
Tabel 2.8 Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Indeks Prioritas

Prioritas	Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Desa	Persentase
1	$\leq 0,0066$	4	3,13%
2	$0,0066 - 0,0125$	13	10,16%
3	$0,0125 - 0,0286$	53	41,41%
4	$0,0286 - 0,0435$	33	25,78%
5	$0,0435 - 0,0662$	20	15,63%
6	$> 0,0662$	5	3,91%

# PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN RASIO JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PENYEDIA PANGAN TERHADAP JUMLAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KUBU RAYA - TAHUN 2022

108.900

109.800



108.900

109.800



**DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA**



## Legenda

□ FSVA - KUBU RAYA

KETERANGAN :

- PRIORITAS 1
- PRIORITAS 2
- PRIORITAS 3
- PRIORITAS 4
- PRIORITAS 5
- PRIORITAS 6

## 2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kubu Raya dari tahun 2017-2021 mencapai 1,26% per tahun. Rata-rata kepemilikan lahan petani di Kabupaten Kubu Raya adalah sebesar 0,5 ha. Rasio lahan pertanian dibandingkan lahan total adalah sebesar 0,9 ha. Sementara itu laju konversi lahan sebesar 1,2%. Rasio sarana ekonomi penyedia pangan pada prioritas 1-3 mencapai 54,69%. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

### **Strategi untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan.**

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya mengenai ketersediaan pangan pada periode 2019-2024 bertujuan untuk (i) meningkatkan produktivitas; (ii) perluasan lahan sawah; (iii) mengurangi dampak iklim-terkait resiko; (iv) memperkuat kelembagaan bagi petani. Strategi untuk masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

- (i) Peningkatan produktivitas
  - a. Pendirian Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu (SLPTT)
  - b. Perbaikan penggunaan varietas tanaman
  - c. Pemupukan berimbang, baik pupuk organik maupun bio hayati
  - d. Pengelolaan air
  - e. Memperkuat pengawasan, koordinasi dan supervisi untuk peningkatan produktivitas pertanian
- (ii) Perluasan lahan sawah
  - a. Pengembangan lahan sawah
  - b. Optimalisasi penggunaan lahan
  - c. Pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)
  - d. Pembangunan sumur pompa dan dam/embung
- (iii) Pengurangan dampak iklim terkait resiko
  - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
  - b. Mengurangi kehilangan hasil (susut) pada saat panen dan pengolahan hasil panen
- (iv) Penguatan kelembagaan bagi petani
  - a. Kredit dan energi untuk ketahanan pangan
  - b. Lembaga Mandiri dan Mengakar pada Masyarakat
  - c. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
  - d. Pemasaran produk pertanian, misal TTI, dll

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya menyusun 6 (enam) strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Hortikultura secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan dan memperbaiki sarana dan prasarana pertanian.
4. Memperkuat kelembagaan petani dan penyuluhan pertanian.
5. Meningkatkan ketahanan pangan di kawasan perdesaan.
6. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian.

### **Arah Kebijakan**

Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ada 14 (empat belas) yaitu:

1. Optimasi lahan pertanian di Kecamatan Batu Ampar, Kubu, Terentang dan Teluk Pakedai;
2. Pembangunan Jaringan Irigasi Baru di Kecamatan Kubu, Batu Ampar dan Terentang;
3. Rehabilitasi jaringan irigasi di Kecamatan Sungai Kakap;
4. Pengadaan alat pengolah lahan dan pemanen padi;
5. Peningkatan komoditas tanaman serealia;
6. Penangkaran benih padi di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Kakap;
7. Penyediaan sarana produksi pertanian (obat dan pupuk);
8. Penguatan brigade proteksi tanaman;
9. Pemantapan ketahanan pangan rumah tangga;
10. Penguatan peran PPL di Kecamatan Batu Ampar, Sungai Kakap dan Kubu;
11. Peningkatan produksi cabai rawit, kacang Panjang, dan ketimun;
12. Peningkatan pemasaran hasil komoditas padi.

## BAB 3

### AKSES TERHADAP PANGAN



Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi**: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik**: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial**: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

### 3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Rasio kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kabupaten Kubu Raya terus mengalami penurunan dari 5,26% atau 29.530 jiwa tahun 2017 menjadi 4,34% atau 25.470 jiwa tahun 2021.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kubu Raya 2017 - 2021

Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	29,53	28,86	27,37	25,90	25,47

Sumber: Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, BPS 2022.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kubu Raya 2017 - 2021

Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Penduduk Miskin	5,26	5,07	4,74	4,42	4,34

Sumber: Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, BPS 2022.

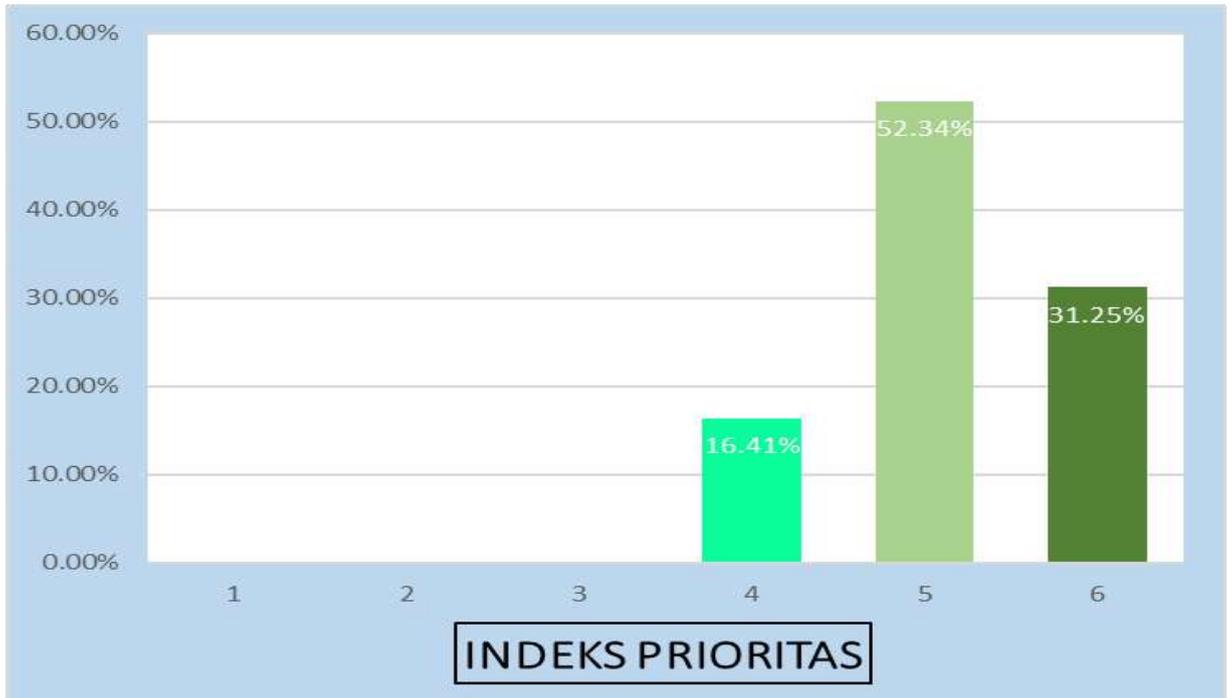
Pada tingkat desa berdasarkan data Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Triwulan IV tahun 2021, di Kabupaten Kubu Raya tidak ada desa yang termasuk dalam prioritas 1-3. Hal ini menunjukkan tingkat kemiskinan Kabupaten Kubu Raya semakin menurun dan program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya menunjukkan keberhasilan.

Tabel 3.3 Sebaran Desa Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas

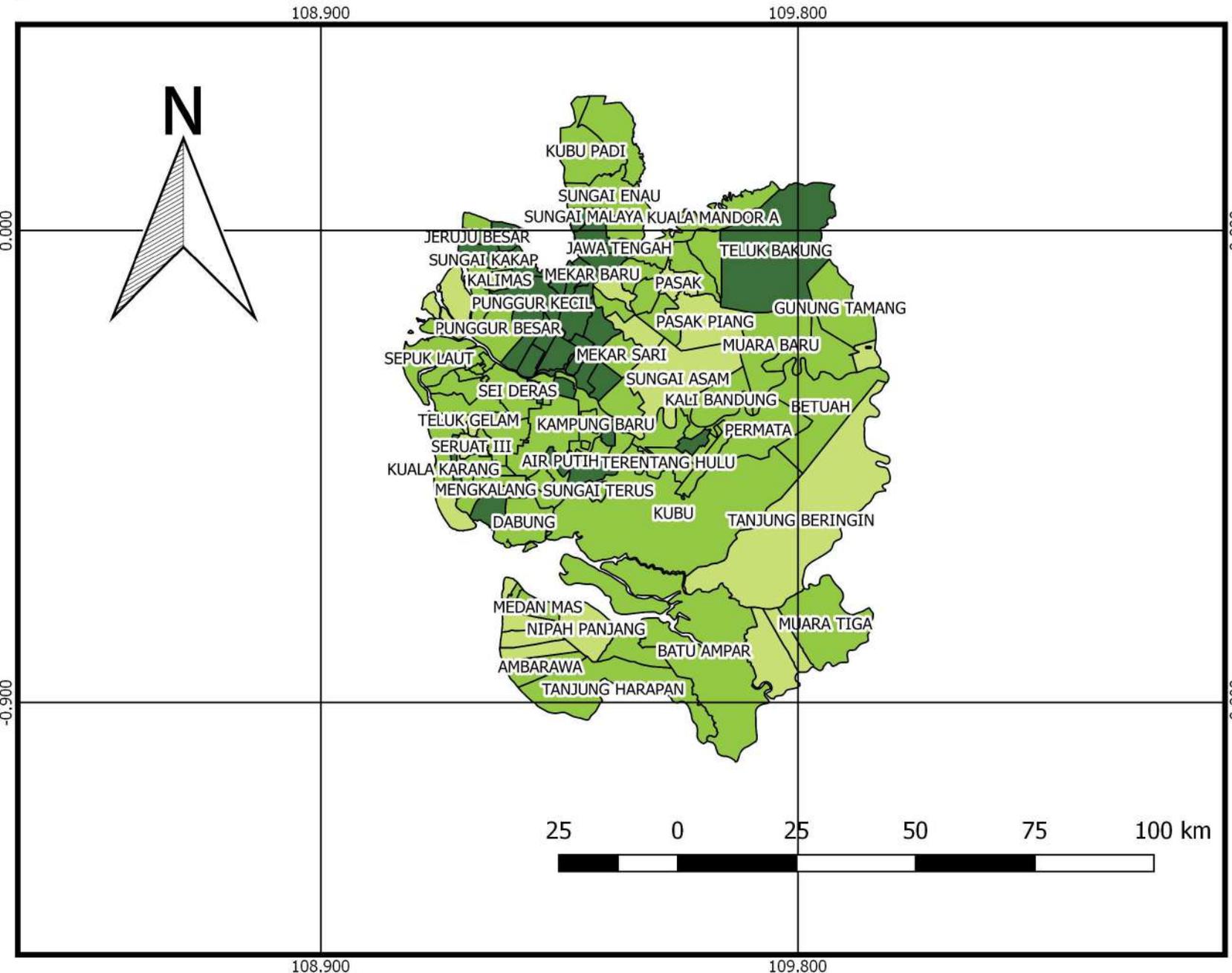
Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 0,2408$	0	0%
2	$0,2051 < 0,2408$	0	0%
3	$0,1331 < 0,2051$	0	0%
4	$0,0728 < 0,1331$	21	16,41%
5	$0,0309 < 0,0728$	67	52,34%
6	$< 0,0309$	40	31,25%

Sumber: Dinas Sosial, 2021.

Grafik 3.1 Sebaran Desa Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas



# PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN RASIO JUMLAH PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH TERHADAP JUMLAH PENDUDUK DESA DI KABUPATEN KUBU RAYA - TAHUN 2022





**DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA**



**Legenda**

□ FSVA - KUBU RAYA

**KETERANGAN :**

- PRIORITAS 1
- PRIORITAS 2
- PRIORITAS 3
- PRIORITAS 4
- PRIORITAS 5
- PRIORITAS 6

### 3.2 AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor-melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Berbeda dengan indikator lainnya, untuk indikator desa tanpa akses penghubung yang memadai dikategorikan menjadi 4 skala prioritas. Prioritas 1 dengan nilai kategorik 4 menunjukkan desa yang tidak dapat dilalui sepanjang tahun. Prioritas 2 dengan nilai kategorik 3 menunjukkan desa yang bisa dilalui sepanjang tahun kecuali sepanjang musim hujan. Prioritas 3 dengan nilai kategorik 2 menunjukkan desa yang bisa dilalui sepanjang tahun kecuali saat tertentu seperti ketika turun hujan ataupun

air pasang. Prioritas 4 dengan nilai kategorik 1 menunjukkan desa yang bisa dilalui sepanjang tahun.

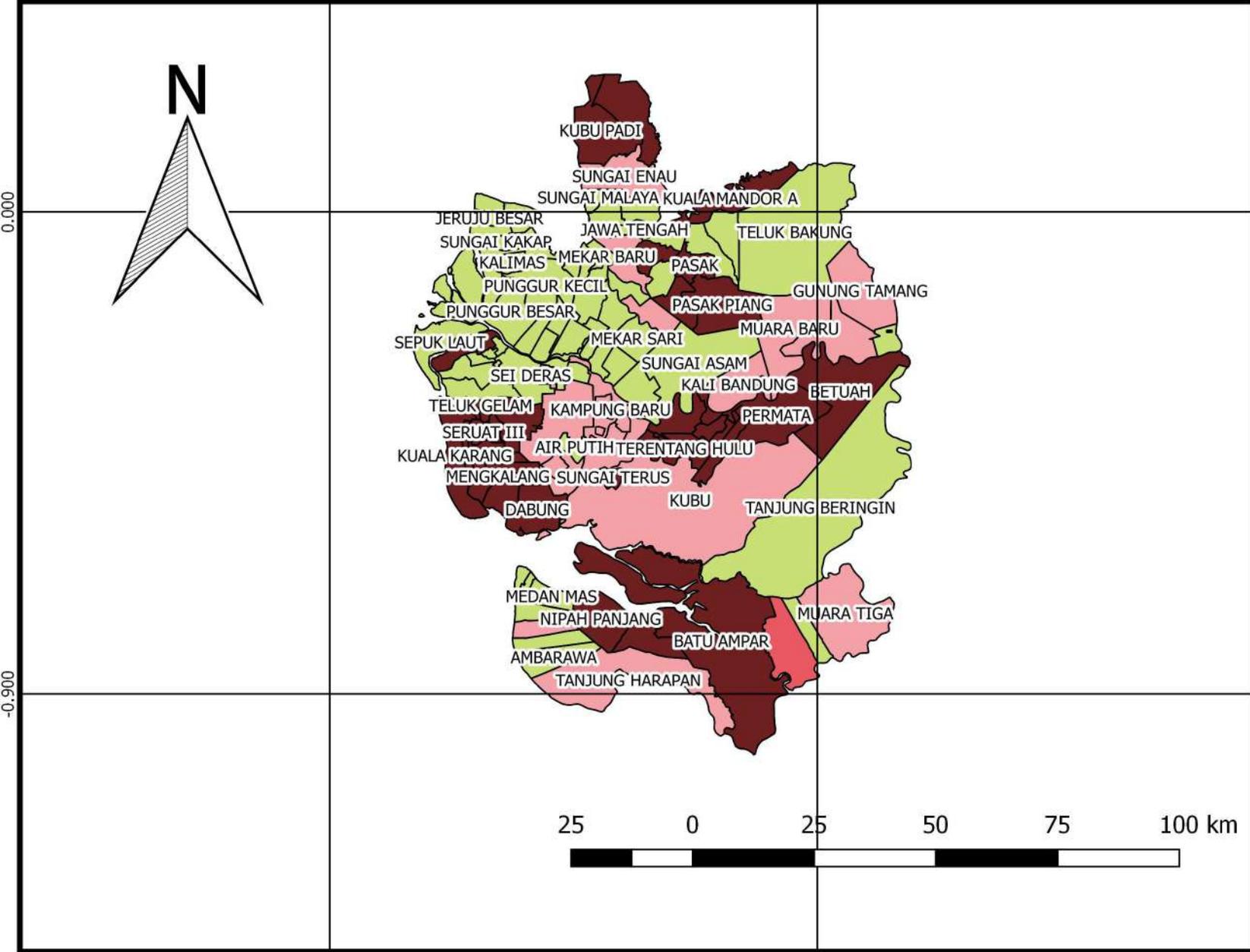
Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2021, BPS, di Kabupaten Kubu Raya hampir semua desa memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun. Desa yang bisa dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, longsor, pasang, dll) terdapat di 65 desa yang tersebar di 9 kecamatan Kabupaten Kubu Raya. Sementara desa yang bisa dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali sepanjang musim hujan terdapat di 23 desa yang terbagi di Kecamatan Batu Ampar (Desa Tanjung Harapan, Desa Sungai Besar, dan Desa Muara Tiga), Kecamatan Kubu (Desa Kubu, Desa Teluk Nangka, Desa Jangkang I, Desa Jangkang II, Desa Pinang Dalam, Desa Kampung Baru, Desa Olak-olak Kubu, Desa Pelita Jaya, dan Desa Ambawang), Kecamatan Teluk Pakedai (Desa Arus Deras), Desa Sungai Raya (Desa Tebang Kacang, Desa Pulau Limbung, Desa Gunung Tamang, Desa Madu Sari, Desa Kali Bandung, Desa Muara Baru, Desa Persiapan Permata Jaya, dan Desa Persiapan Suku Lanting, Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Durian) dan Kecamatan Kuala Mandor B (Desa Sungai Enau). Desa yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun terdapat di 39 desa yang terbagi di Kecamatan Batu Ampar 3 desa, Kecamatan Terentang 10 desa, Kecamatan Kubu 20 desa, Kecamatan Teluk Pakedai 7 desa, Kecamatan Sungai Ambawang 4 desa, dan Kecamatan Kuala Mandor B 5 desa.

Jalan merupakan moda transportasi utama di Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi terdapat beberapa kecamatan di mana moda transportasi air masih menjadi bagian penting dari moda transportasinya. Kondisi geografis hanya memungkinkan menggunakan moda transportasi air. Masyarakat menggunakan perahu motor sebagai moda transportasinya, contohnya di wilayah Kecamatan Batu Ampar. Data yang akurat untuk moda transportasi air tidak tersedia, jenis transportasi ini tidak dimasukkan sebagai salah satu indikator akses infrastruktur.

# PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN DESA YANG TIDAK MEMILIKI AKSES PENGHUBUNG MEMADAI MELALUI DARAT, AIR DAN UDARA DI KABUPATEN KUBU RAYA - TAHUN 2022

108.900

109.800



108.900

109.800



**DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA**



## Legenda

□ FSVA - KUBU RAYA

KETERANGAN :

- PRIORITAS 1
- PRIORITAS 2
- PRIORITAS 3
- PRIORITAS 4
- PRIORITAS 5
- PRIORITAS 6

### 3.3 Strategi Peningkatan Akses Pangan

#### Strategi Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Akses terhadap Pangan

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk menanggulangi kemiskinan seperti yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024 diantaranya:

1. Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin
2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat perdesaan
3. Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agrobisnis dan agroindustri
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh
5. Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa-kota, pulau-pulau kecil dan daerah terisolir
6. Mendorong pengembangan pelabuhan secara terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya dalam melayani kawasan perkotaan dan perdesaan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya diterbitkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016. Kebijakan penataan ruang wilayah terkait dengan pertanian adalah Pengembangan kawasan yang berbasis pertanian dengan konsep agrobisnis dan agroindustri. Strategi untuk pengembangan kawasan yang berbasis pertanian dengan konsep agrobisnis dan agroindustri adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sentra produksi hasil pertanian dan pengolahan hasil pertanian serta pemasaran baik tingkat desa, perkotaan maupun wilayah.
2. Mengembangkan pusat agropolitan.
3. Menetapkan kawasan agropolitan dan kawasan *food estate*.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kawasan agropolitan dan kawasan *food estate*.
5. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional disertai dengan upaya untuk peningkatan produksi dan produktivitas pertanian serta pengembangan agrobisnis dan agroindustri di kawasan perdesaan.

## BAB 4

### PEMANFAATAN PANGAN



Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

#### 4.1 AKSES TERHADAP AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan

kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Grafik 4.1 Sebaran Desa Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Indeks Prioritas



Tabel 4.1 Sebaran Desa Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Indeks Prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 0,8535$	3	2,34 %
2	$0,7068 < 0,8535$	12	9,37 %
3	$0,6201 < 0,7068$	11	8,59 %
4	$0,5227 < 0,6201$	23	17,96 %
5	$0,3303 < 0,5227$	50	39,06 %
6	$< 0,3303$	29	22,65 %

Sumber : Data Terpadu PPFM-SK Jan 2019

# PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN RASIO JUMLAH RUMAH TANGGA TANPA AKSES AIR BERSIH TERHADAP JUMLAH RUMAH TANGGA DESA DI KABUPATEN KUBU RAYA - TAHUN 2022

108.900

109.800



108.900

109.800



**DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA**



## Legenda

□ FSVA - KUBU RAYA

KETERANGAN :

- PRIORITAS 1
- PRIORITAS 2
- PRIORITAS 3
- PRIORITAS 4
- PRIORITAS 5
- PRIORITAS 6

## 4.2 RASIO TENAGA KESEHATAN

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Grafik 4.2 Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan Di Desa Berdasarkan Indeks Prioritas



Tabel 4.2 Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan Di Desa Berdasarkan Skala Prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 55,85813599$	17	13,28 %
2	$32,376807265 < 55,85813599$	18	14,06 %
3	$19,5527529426341 < 32,376807265$	23	17,96 %
4	$7,9721143295 < 19,5527529426341$	41	32,03 %
5	$3,064338952 < 7,9721143295$	16	12,5 %
6	$< 3,064338952$	13	10,15 %

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Semester 1 Tahun 2022

# PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN RASIO JUMLAH PENDUDUK DESA PER TENAGA KESEHATAN TERHADAP KEPADATAN PENDUDUK DI KABUPATEN KUBU RAYA - TAHUN 2022

108.900

109.800



**DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA**



## Legenda

□ FSVA - KUBU RAYA

KETERANGAN :

- PRIORITAS 1
- PRIORITAS 2
- PRIORITAS 3
- PRIORITAS 4
- PRIORITAS 5
- PRIORITAS 6

108.900

109.800

### 4.3 DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau *stunting* (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau *wasting* (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

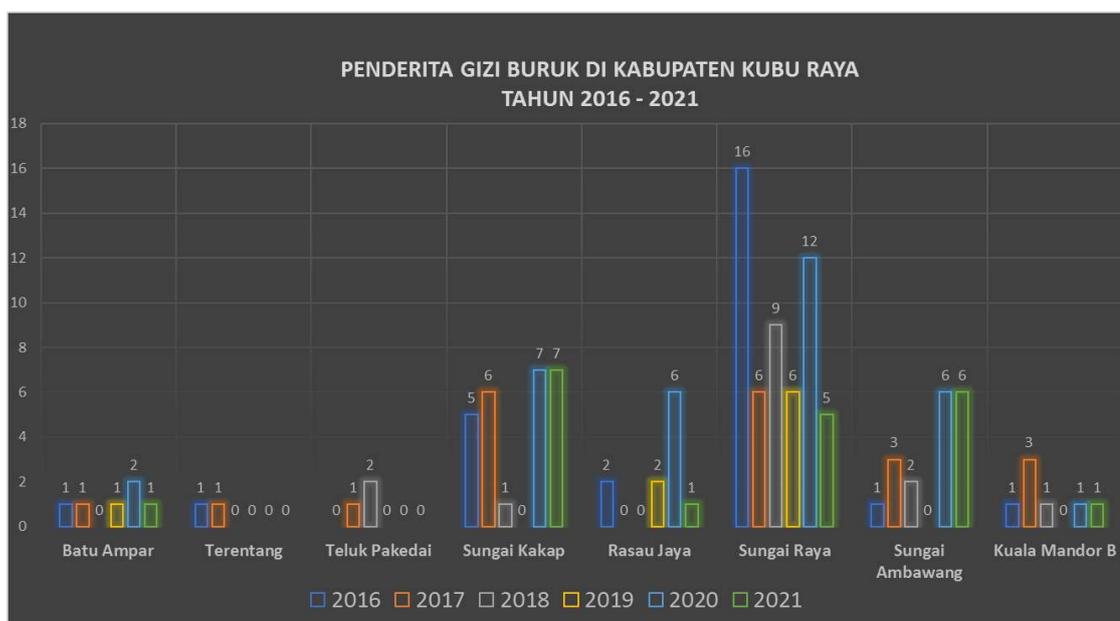
Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2021 sebanyak 22 balita. Jumlah penderita gizi buruk yang tinggi ditemukan di Kecamatan Sungai Kakap berjumlah 7 balita dan Kecamatan Sungai Ambawang berjumlah 6 balita, dan terendah ditemukan di Kecamatan Terentang dan Kecamatan Teluk Pakedai tidak ditemukan kasus gizi buruk.

Tabel 4.3 Penderita Gizi Buruk 2017-2021

No.	Kecamatan	Penderita Gizi Buruk				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Batu Ampar	1	0	1	2	1
2.	Terentang	1	0	0	0	0
3.	Kubu	1	1	14	1	1
4.	Teluk Pakedai	1	2	0	0	0
5.	Sungai Kakap	6	1	0	7	7
6.	Rasau Jaya	0	0	2	6	1
7.	Sungai Raya	6	9	6	12	5
8.	Sungai Ambawang	3	2	0	6	6
9.	Kuala Mandor B	3	1	0	1	1
	<b>Total</b>	22	16	23	35	22

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021

Grafik 4.3 Penderita Gizi Buruk 2016 – 2021



Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 adalah 1 jiwa. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 adalah 54 jiwa. Angka kematian balita terdapat di Kecamatan Sungai Raya adalah 1 jiwa. Angka kematian ibu saat melahirkan tertinggi di Kecamatan Teluk Pakedai adalah 12 jiwa dan terendah di Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Kuala Mandor tidak ditemukan kasus kematian ibu saat melahirkan. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Jumlah Kematian Bayi Dan Balita Per Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Kematian Bayi dan Balita		
		Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Kematian Balita	Jumlah
1	Batu Ampar	7	0	7
2	Terentang	2	0	2
3	Kubu	6	0	6
4	Teluk Pakedai	12	0	12
5	Sungai Kakap	11	0	11
6	Rasau Jaya	0	0	0
7	Sungai Raya	8	1	9
8	Sungai Ambawang	8	0	8
9	Kuala Mandor B	0	0	0
	Jumlah	54	1	55

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021

Grafik 4.4 Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan



#### 4.4. STRATEGI PENINGKATAN PEMANFAATAN PANGAN

Strategi Untuk Memperbaiki Status Gizi dan Kesehatan Kelompok Rentan adalah dengan Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan, agroindustri, teknologi, jasa, kemitraan, dan meningkatkan sarana, prasarana, infrastruktur wilayah yang merata dan berkualitas, serta memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) secara berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana Layanan Dasar Masyarakat. Misi ini merupakan upaya Kabupaten Kubu Raya dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana layanan dasar guna mendukung pembangunan di bidang sosial ekonomi masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi publik untuk bersamasama pemerintah dalam memelihara dan membangun kualitas sarana dan prasarana publik.

Pembangunan sarana dan prasarana akan diwujudkan dengan memperhatikan tata ruang wilayah, potensi wilayah dan sebaran penduduk serta kondisi geografis dengan mengedepankan skala prioritas, kemampuan pembiayaan, daya manfaat dan tingkat keterdesakan.

Masalah gizi kronis (stunting) masih tetap tinggi di Kabupaten Kubu Raya, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompokrentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:
  - a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua

tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.

- b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
  - c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan an perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
  - d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.
2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).  
Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.
- a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):
    - Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (Sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
    - Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
    - Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
    - Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bias dilakukan intervensi sedini mungkin.

Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.

- Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Departemen Kesehatan.
  - Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian bil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.
- b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)
3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

## BAB 5

### KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab Dua, Tiga dan Empat. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 6.1) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

#### 5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (Kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah desa prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah desa lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah desa yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah desa pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis FSVA Tahun 2022 dari 128 Desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya maka didapatkan **10 Desa (Prioritas 1), 19 Desa (Prioritas 2), 25 Desa (Prioritas 3), 34 desa (Prioritas 4), 35 desa (Prioritas 5) dan 5 desa (Prioritas 6).**

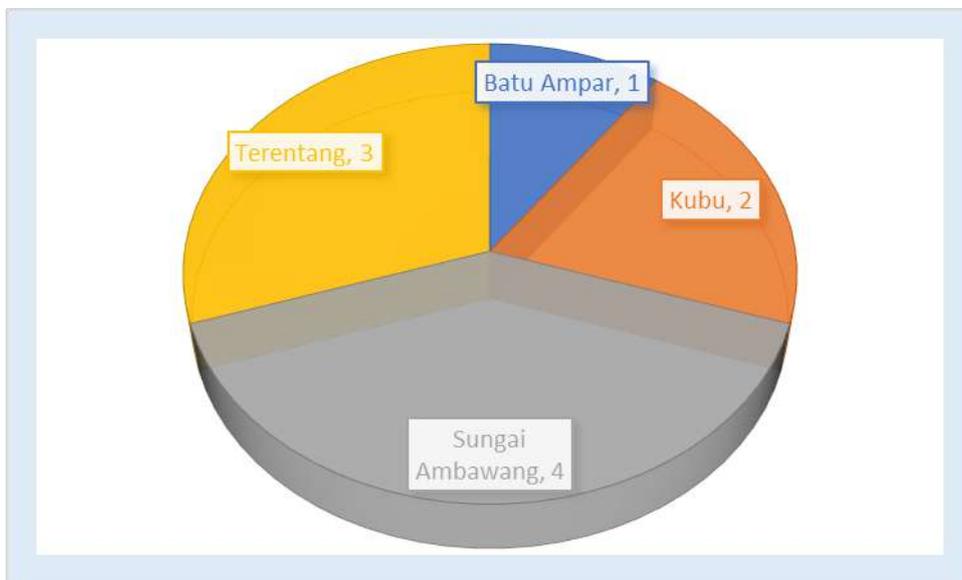
Tabel 5.1. Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Indeks Prioritas

Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	10	7,81%
2	19	14,84%
3	25	19,53%
4	34	26,56%
5	35	27,34%
6	5	3,90%

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 berdasarkan indeks komposit terdapat di wilayah

1. **Kecamatan Batu Ampar (1 Desa) :**  
Desa Tanjung Beringin
2. **Kecamatan Kubu (2 Desa) :**  
Desa Seruat III, dan Desa Sepakat Baru
3. **Kecamatan Sungai Ambawang (4 desa) :**  
Desa Simpang Kanan, Desa Bengkarek, Desa Pasak dan Desa Pasak Piang
4. **Kecamatan Terentang (3 Desa) :**  
Desa Sungai Dungun, Desa Terentang Hulu, dan Desa Betuah

Grafik 5.1 Sebaran Jumlah Desa Prioritas 1 Berdasarkan Indeks Komposit



Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 berdasarkan indeks komposit terdapat di wilayah:

**1. Kecamatan Kubu (2 Desa) :**

Desa Dabung dan Desa Seruat II

**2. Kecamatan Kuala Mandor B (5 Desa) :**

Desa Kuala Mandor A, Desa Kubu Padi, Desa Retok, Desa Persiapan Padi Jaya, Desa Persiapan Sungai Enau A

**3. Kecamatan Terentang (3 Desa) :**

Desa Teluk Bayur, Desa Permata, dan Desa Radak Baru

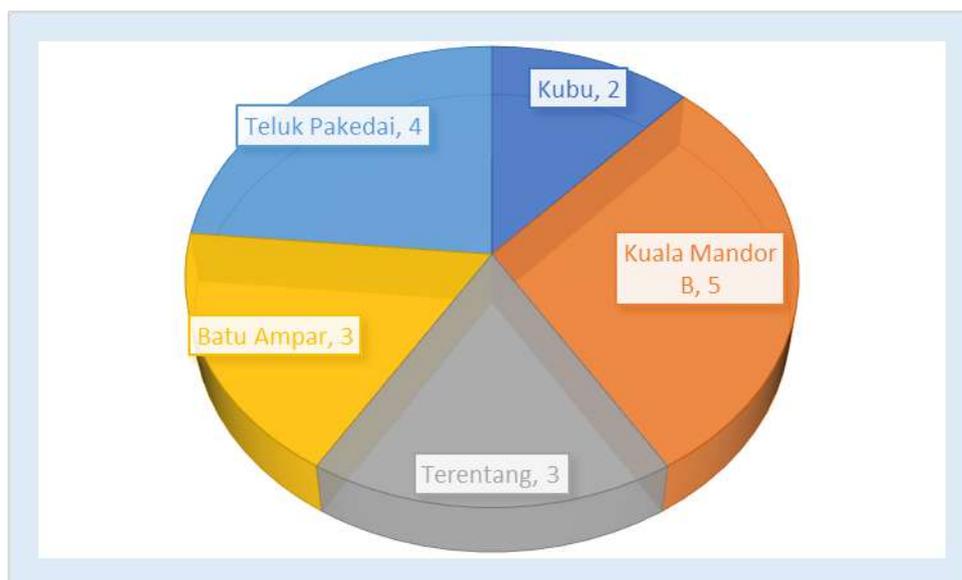
**4. Kecamatan Batu Ampar (3 Desa) :**

Desa Nipah Panjang, Desa Teluk Nibung dan Desa UPT Sui Kerawang

**5. Kecamatan Teluk Pakedai (4 desa)**

Desa Sungai Nibung, Desa Kuala Karang, Desa Tanjung Bunga dan Desa Teluk Gelam

Grafik 5.2 Sebaran Jumlah Desa Prioritas 2 Berdasarkan Indeks Komposit



Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 berdasarkan indeks komposit terdapat di wilayah

**1. Kecamatan Kubu (6 Desa) :**

Desa Sungai Terus, Desa Kampung Baru, Desa Sungai Bemban, Desa Sungai Selamat, Desa Mengkalang dan Desa Persiapan Bemban Timur

**2. Kecamatan Teluk Pakedai (3 desa) :**

Desa Seruat I, Desa Teluk Pakedai I, dan Desa Pasir Putih

**3. Kecamatan Terentang (4 Desa) :**

Desa Teluk Empening, Desa Terentang Hilir, Desa Sungai Radak I dan Desa Sungai Radak II.

**4. Kecamatan Sungai Kakap (1 Desa)**

Desa Sepuk Laut

**5. Kecamatan Sungai Raya (7 Desa)**

Desa Tebang Kacang, Desas Sungai Asam, Desa Pulau Limbung, Desa Gunung Tamang, Desa Madu Sari, Desa Pulau Jambu, Desa Persiapan Suku Lanting

**6. Kecamatan Kuala Mandor B (1 Desa)**

Desa Sungai Enau

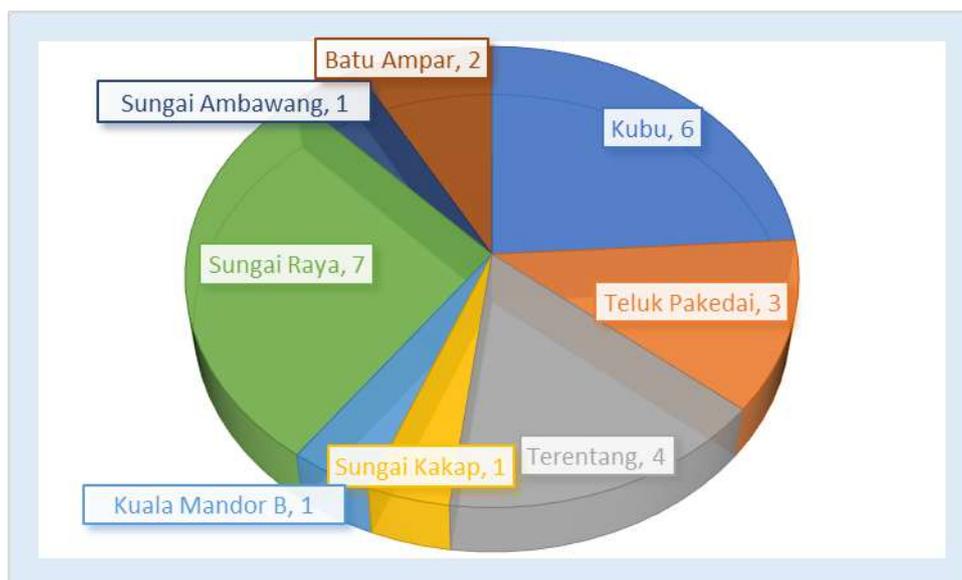
**7. Kecamatan Sungai Ambawang (1 Desa)**

Desa Persiapan Simpang Raya

**8. Kecamatan Batu Ampar (2 Desa)**

Desa Tasik Malaya dan Desa Medan Mas

Grafik 5.3 Sebaran Jumlah Desa Prioritas 3 Berdasarkan Indeks Komposit





## 5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 1 secara umum disebabkan oleh rendahnya nilai rasio luas lahan baku sawah terhadap luas wilayah desa serta kurangnya akses penghubung yang memadai, sebagaimana dirincikan pada tabel 5.2.

Tabel 5.2 Faktor Penyebab Kerentanan Pangan Prioritas 1

Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes
BATU AMPAR	TANJUNG BERINGIN	1	3	4	4	1	1
TERENTANG	SUNGAI DUNGUN	1	3	5	1	2	4
TERENTANG	TERENTANG HULU	1	3	5	1	3	3
TERENTANG	BETUAH	1	5	5	1	2	1
KUBU	SERUAT III	2	3	4	1	4	3
KUBU	SEPAKAT BARU	2	5	4	1	3	5
SUNGAI AMBAWANG	SIMPANG KANAN	1	3	5	1	4	2
SUNGAI AMBAWANG	BENGKAREK	2	3	5	1	2	2
SUNGAI AMBAWANG	PASAK PIANG	2	3	4	1	2	1
SUNGAI AMBAWANG	PASAK	3	3	4	1	4	3

KETERANGAN	
Nilai Prioritas Komposit	Kriteria
1	Sangat Rentan
2	Rentan
3	Cukup Rentan
4	Cukup Tahan
5	Tahan
6	Sangat Tahan

Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 2 secara umum disebabkan oleh kurangnya akses penghubung yang memadai, sebagaimana dirincikan pada tabel 5.3.

Tabel 5.3 Faktor Penyebab Kerentanan Pangan Prioritas 2

Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes
BATU AMPAR	NIPAH PANJANG	6	3	4	1	3	2
BATU AMPAR	TELUK NIBUNG	5	4	5	1	4	4
BATU AMPAR	UPT SEI KERAWANG	6	3	4	2	2	5
TERENTANG	TELUK BAYUR	4	5	5	1	2	3
TERENTANG	PERMATA	5	5	5	1	4	1
TERENTANG	RADAK BARU	1	4	5	1	5	3
KUBU	DABUNG	2	5	5	1	4	3
KUBU	SERUAT II	5	4	5	1	3	3
TELUK PAKEDAI	SEI NIBUNG	4	4	4	1	4	2
TELUK PAKEDAI	KUALA KARANG	5	3	5	1	5	3
TELUK PAKEDAI	TANJUNG BUNGA	6	4	5	1	4	4
TELUK PAKEDAI	TELUK GELAM	6	3	4	1	4	4
SUNGAI RAYA	MUARA BARU	1	4	5	3	3	1
SUNGAI RAYA	DESA PERSIAPAN PERMATA JAYA	4	3	4	3	5	1
KUALA MANDOR B	KUALA MANDOR A	2	2	5	1	5	4
KUALA MANDOR B	KUBU PADI	2	2	5	1	5	2
KUALA MANDOR B	RETOK	4	3	5	1	5	2
KUALA MANDOR B	DESA PERSIAPAN PADI JAYA	2	3	5	1	5	2
KUALA MANDOR B	DESA PERSIAPAN SUNGAI ENAU A	3	2	5	1	5	2

KETERANGAN	
Nilai Prioritas Komposit	Kriteria
1	Sangat Rentan
2	Rentan
3	Cukup Rentan
4	Cukup Tahan
5	Tahan
6	Sangat Tahan

Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 secara umum disebabkan oleh kurangnya akses penghubung yang memadai, sebagaimana dirincikan pada tabel 5.4.

Tabel 5.4 Faktor Penyebab Kerentanan Pangan Prioritas 3

Nama Kecamatan	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes
BATU AMPAR	TASIK MALAYA	3	4	4	4	3	4
BATU AMPAR	MEDAN MAS	3	4	5	4	2	4
TERENTANG	TELUK EMPENING	6	4	5	1	5	5
TERENTANG	TERENTANG HILIR	5	4	6	1	3	6
TERENTANG	SUNGAI RADAK I	5	5	5	1	2	5
TERENTANG	SUNGAI RADAK II	4	5	5	1	4	3
KUBU	SUNGAI TERUS	5	4	5	1	5	4
KUBU	KAMPUNG BARU	6	3	5	3	2	1
KUBU	SUNGAI SELAMAT	5	4	5	1	5	3
KUBU	SEI BEMBAN	6	3	5	1	6	1
KUBU	MENKALANG	6	4	5	1	5	2
KUBU	DESA PERSIAPAN BEMBAN TIMUR	6	3	5	1	6	3
TELUK PAKEDAI	SERUAT I	6	4	6	1	4	4
TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI I	6	4	5	1	4	3
TELUK PAKEDAI	PASIR PUTIH	6	5	5	1	4	4
SUNGAI KAKAP	SEPUK LAUT	2	2	5	4	5	2
SUNGAI RAYA	TEBANG KACANG	3	4	4	3	3	4
SUNGAI RAYA	SUNGAI ASAM	4	2	4	4	5	1
SUNGAI RAYA	PULAU LIMBUNG	1	3	5	3	5	2
SUNGAI RAYA	GUNUNG TAMANG	1	4	5	3	5	1
SUNGAI RAYA	MADU SARI	2	3	4	3	5	4
SUNGAI RAYA	PULAU JAMBU	1	4	4	4	1	3
SUNGAI RAYA	DESA PERSIAPAN SUKU LANTING	4	2	4	3	5	5
SUNGAI AMBAWANG	DESA PERSIAPAN SIMPANG RAYA	1	1	5	4	4	2
KUALA MANDOR B	SUNGAI ENAU	3	3	5	3	5	2

KETERANGAN	
Nilai Prioritas Komposit	Kriteria
1	Sangat Rentan
2	Rentan
3	Cukup Rentan
4	Cukup Tahan
5	Tahan
6	Sangat Tahan

## **BAB 6**

### **REKOMENDASI KEBIJAKAN**

Pentingnya pangan sebagai pemenuhan gizi dan nutrisi masyarakat merupakan salah satu fungsi utamanya. Fungsi ketersediaan pangan bagi masyarakat merupakan fungsi primer atau utama. Dengan adanya pangan, masyarakat dapat hidup dengan sehat dan beraktivitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Namun jika tanpa pangan, masyarakat tidak dapat hidup secara sehat, beraktivitas normal, dan bekerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Seiring dengan bertambahnya permintaan pangan karena jumlah masyarakat yang terus meningkat, ketahanan pangan menjadi isu yang banyak dibahas agar masyarakat bisa tetap hidup dan beraktivitas seperti biasa. Ketahanan pangan diartikan sebagai ketersediaan pangan untuk menjamin kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, Indonesia saat ini sedang berupaya untuk meraih ketahanan pangan demi menjamin kehidupan masyarakatnya.

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah desa, dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah desa diprioritaskan pada:

- a. Desa-desanya prioritas 1-3 yang tersebar di 8 Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya (kecuali Kecamatan Rasau Jaya).
- b. Desa-desanya yang lokasinya jauh dari ibu kota Kabupaten atau di wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten lain.
- c. Desa-desanya di wilayah kepulauan yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan.
- d. Desa-desanya pemekaran yang fasilitas, infrastruktur, dan kapasitas sumberdaya manusianya masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa seperti digambarkan pada Gambar 6.1.

Gambar 6.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan



Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah Kabupaten Kubu Raya diarahkan pada kegiatan:

- Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- Pembukaan lahan pertanian pertanian baru
- Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- Penyediaan tenaga kesehatan.

# LAMPIRAN



## Lampiran 2. Desa dengan Skala Prioritas Komposit 1

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
1	BATU AMPAR	TANJUNG BERINGIN	1	3	4	4	1	1	19,50	128	1
2	TERENTANG	SUNGAI DUNGUN	1	3	5	1	2	4	32,71	120	1
3	TERENTANG	TERENTANG HULU	1	3	5	1	3	3	32,25	122	1
4	TERENTANG	BETUAH	1	5	5	1	2	1	30,93	125	1
5	KUBU	SERUAT III	2	3	4	1	4	3	32,23	124	1
6	KUBU	SEPAKAT BARU	2	5	4	1	3	5	32,28	121	1
7	SUNGAI AMBAWANG	SIMPANG KANAN	1	3	5	1	4	2	32,24	123	1
8	SUNGAI AMBAWANG	BENGKAREK	2	3	5	1	2	2	29,79	126	1
9	SUNGAI AMBAWANG	PASAK PIANG	2	3	4	1	2	1	27,63	127	1
10	SUNGAI AMBAWANG	PASAK	3	3	4	1	4	3	33,67	119	1

### Lampiran 3. Desa dengan Skala Prioritas Komposit 2

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
1	BATU AMPAR	NIPAH PANJANG	6	3	4	1	3	2	36,49	115	2
2	BATU AMPAR	TELUK NIBUNG	5	4	5	1	4	4	40,64	106	2
3	BATU AMPAR	UPT SEI KERAWANG	6	3	4	2	2	5	37,71	111	2
4	TERENTANG	TELUK BAYUR	4	5	5	1	2	3	36,03	116	2
5	TERENTANG	PERMATA	5	5	5	1	4	1	40,83	105	2
6	TERENTANG	RADAK BARU	1	4	5	1	5	3	42,98	102	2
7	KUBU	DABUNG	2	5	5	1	4	3	37,47	113	2
8	KUBU	SERUAT II	5	4	5	1	3	3	37,48	112	2
9	TELUK PAKEDAI	SEI NIBUNG	4	4	4	1	4	2	37,22	114	2
10	TELUK PAKEDAI	KUALA KARANG	5	3	5	1	5	3	41,25	104	2
11	TELUK PAKEDAI	TANJUNG BUNGA	6	4	5	1	4	4	42,99	101	2
12	TELUK PAKEDAI	TELUK GELAM	6	3	4	1	4	4	37,76	110	2
13	SUNGAI RAYA	MUARA BARU	1	4	5	3	3	1	43,09	100	2
14	SUNGAI RAYA	DESA PERSIAPAN PERMATA JAYA	4	3	4	3	5	1	42,86	103	2
15	KUALA MANDOR B	KUALA MANDOR A	2	2	5	1	5	4	38,26	108	2
16	KUALA MANDOR B	KUBU PADI	2	2	5	1	5	2	34,76	118	2
17	KUALA MANDOR B	RETOK	4	3	5	1	5	2	38,15	109	2
18	KUALA MANDOR B	DESA PERSIAPAN PADI JAYA	2	3	5	1	5	2	35,81	117	2
19	KUALA MANDOR B	DESA PERSIAPAN SUNGAI ENAU A	3	2	5	1	5	2	38,29	107	2

### Lampiran 4. Desa dengan Skala Prioritas Komposit 3

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
1	BATU AMPAR	TASIK MALAYA	3	4	4	4	3	4	49,77	81	3
2	BATU AMPAR	MEDAN MAS	3	4	5	4	2	4	49,24	84	3
3	TERENTANG	TELUK EMPENING	6	4	5	1	5	5	45,20	94	3
4	TERENTANG	TERENTANG HILIR	5	4	6	1	3	6	45,42	93	3
5	TERENTANG	SUNGAI RADAK I	5	5	5	1	2	5	43,51	99	3
6	TERENTANG	SUNGAI RADAK II	4	5	5	1	4	3	44,53	97	3
7	KUBU	SUNGAI TERUS	5	4	5	1	5	4	45,87	92	3
8	KUBU	KAMPUNG BARU	6	3	5	3	2	1	49,57	82	3
9	KUBU	SUNGAI SELAMAT	5	4	5	1	5	3	46,45	89	3
10	KUBU	SEI BEMBAN	6	3	5	1	6	1	50,25	77	3
11	KUBU	MENGKALANG	6	4	5	1	5	2	46,10	90	3
12	KUBU	DESA PERSIAPAN BEMBAN TIMUR	6	3	5	1	6	3	49,36	83	3
13	TELUK PAKEDAI	SERUAT I	6	4	6	1	4	4	48,83	86	3
14	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI I	6	4	5	1	4	3	50,08	78	3
15	TELUK PAKEDAI	PASIR PUTIH	6	5	5	1	4	4	49,23	85	3
16	SUNGAI KAKAP	SEPUK LAUT	2	2	5	4	5	2	49,98	79	3
17	SUNGAI RAYA	TEBANG KACANG	3	4	4	3	3	4	44,48	98	3
18	SUNGAI RAYA	SUNGAI ASAM	4	2	4	4	5	1	47,60	88	3
19	SUNGAI RAYA	PULAU LIMBUNG	1	3	5	3	5	2	49,78	80	3
20	SUNGAI RAYA	GUNUNG TAMANG	1	4	5	3	5	1	50,61	75	3
21	SUNGAI RAYA	MADU SARI	2	3	4	3	5	4	46,03	91	3
22	SUNGAI RAYA	PULAU JAMBU	1	4	4	4	1	3	45,15	95	3
23	SUNGAI RAYA	DESA PERSIAPAN SUKU LANTING	4	2	4	3	5	5	44,89	96	3
24	SUNGAI AMBAWANG	DESA PERSIAPAN SIMPANG RAYA	1	1	5	4	4	2	47,71	87	3
25	KUALA MANDOR B	SUNGAI ENAU	3	3	5	3	5	2	50,33	76	3

## Lampiran 5. Desa dengan Skala Prioritas Komposit 4

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
1	BATU AMPAR	TANJUNG HARAPAN	6	4	5	3	2	1	53,03	65	4
2	BATU AMPAR	SUNGAI JAWI	6	4	4	4	2	3	53,23	64	4
3	BATU AMPAR	SUNGAI BESAR	5	6	4	3	5	4	54,70	59	4
4	BATU AMPAR	PADANG TIKAR I	1	3	4	4	5	5	52,08	67	4
5	BATU AMPAR	PADANG TIKAR II	1	4	5	4	5	6	56,01	53	4
6	BATU AMPAR	SUMBER AGUNG	6	5	4	4	3	3	57,24	50	4
7	BATU AMPAR	MUARA TIGA	6	3	5	3	5	1	51,71	71	4
8	KUBU	KUBU	4	3	5	3	5	3	51,72	70	4
9	KUBU	TELUK NANGKA	5	3	6	3	5	4	58,20	45	4
10	KUBU	JANGKANG I	4	3	6	3	4	5	53,01	66	4
11	KUBU	JANGKANG II	5	5	5	3	4	4	55,82	55	4
12	KUBU	PINANG DALAM	5	3	5	3	4	4	51,96	68	4
13	KUBU	OLAK OLAK KUBU	6	3	5	3	5	4	54,14	62	4
14	KUBU	PELITA JAYA	1	3	5	3	5	4	51,64	72	4
15	KUBU	AMBAWANG	6	3	5	3	5	1	55,33	56	4
16	KUBU	MENGKALANG JAMBU	6	4	6	1	3	2	58,97	42	4
17	TELUK PAKEDAI	SELAT REMIS	3	5	5	4	4	4	58,97	41	4
18	TELUK PAKEDAI	SUNGAI NIPAH	5	3	5	4	5	4	58,78	43	4
19	SUNGAI KAKAP	TANJUNG SALEH	6	4	4	4	2	2	58,77	44	4
20	SUNGAI KAKAP	SUNGAI BELIDAK	5	3	5	4	5	4	58,04	46	4
21	SUNGAI KAKAP	SUNGAI KUPAH	3	2	5	4	5	4	54,86	58	4
22	SUNGAI KAKAP	PUNGGUR KAPUAS	5	2	5	4	5	4	58,03	47	4
23	SUNGAI RAYA	SUNGAI AMBANGAH	3	3	5	4	5	5	54,40	60	4
24	SUNGAI RAYA	SUNGAI BULAN	5	5	5	4	3	3	57,70	48	4
25	SUNGAI RAYA	MEKAR SARI	3	3	5	4	4	4	51,63	73	4
26	SUNGAI RAYA	KALI BANDUNG	4	5	5	3	4	1	53,23	63	4
27	SUNGAI AMBAWANG	DURIAN	2	3	6	3	5	4	54,28	61	4
28	SUNGAI AMBAWANG	PUGUK	1	4	5	4	4	2	50,70	74	4
29	SUNGAI AMBAWANG	PANCA ROBA	1	3	5	4	5	4	55,28	57	4
30	SUNGAI AMBAWANG	LINGGA	2	3	5	4	5	4	56,65	52	4
31	SUNGAI AMBAWANG	KOREK	1	3	5	4	5	4	51,75	69	4
32	SUNGAI AMBAWANG	DESA PERSIAPAN KUALA BAKUNG	2	2	6	4	6	1	57,17	51	4
33	SUNGAI AMBAWANG	DESA PERSIAPAN LINTANG BATANG	2	2	6	4	6	1	57,47	49	4
34	KUALA MANDOR B	KUALA MANDOR-B	3	3	5	4	5	6	55,98	54	4

## Lampiran 6. Desa dengan Skala Prioritas Komposit 5

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
1	BATU AMPAR	AMBARAWA	6	5	5	4	1	3	65,63	14	5
2	BATU AMPAR	BATU AMPAR	5	6	5	1	6	3	60,22	38	5
3	KUBU	AIR PUTIH	4	3	6	4	5	6	63,08	25	5
4	KUBU	PINANG LUAR	4	4	6	4	5	4	61,82	32	5
5	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI HULU	5	5	5	4	5	5	61,91	30	5
6	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI II	6	4	5	4	4	6	62,75	27	5
7	TELUK PAKEDAI	MADURA	5	5	5	4	5	6	63,73	20	5
8	TELUK PAKEDAI	SEI DERAS	3	5	5	4	5	2	63,05	26	5
9	TELUK PAKEDAI	ARUS DERAS	2	6	6	3	6	5	65,39	16	5
10	SUNGAI KAKAP	PUNGGUR BESAR	6	4	5	4	5	3	63,36	22	5
11	SUNGAI KAKAP	PUNGGUR KECIL	4	3	6	4	6	3	65,56	15	5
12	SUNGAI KAKAP	KALIMAS	4	3	5	4	5	4	60,97	34	5
13	SUNGAI KAKAP	SUNGAI KAKAP	3	3	6	4	6	3	62,50	28	5
14	SUNGAI KAKAP	SUNGAI ITIK	4	1	6	4	5	4	59,58	39	5
15	SUNGAI KAKAP	SUNGAI RENGAS	3	1	6	4	6	4	63,53	21	5
16	SUNGAI KAKAP	JERUJU BESAR	3	2	6	4	6	5	63,26	23	5
17	SUNGAI KAKAP	DESA PERSIAPAN PARIT KELADI	3	1	6	4	6	3	63,23	24	5
18	SUNGAI KAKAP	DESA PERSIAPAN RENGAS KAPUAS	2	2	6	4	6	4	62,40	29	5
19	RASAU JAYA	RASAU JAYA UMUM	3	5	6	4	6	4	68,02	6	5
20	RASAU JAYA	BINTANG MAS	4	3	6	4	5	4	60,50	37	5
21	RASAU JAYA	RASAU JAYA III	4	3	6	4	5	4	61,17	33	5
22	RASAU JAYA	RASAU JAYA II	2	3	6	4	5	5	60,52	36	5
23	RASAU JAYA	PEMATANG TUJUH	3	5	6	4	5	4	64,39	18	5
24	SUNGAI RAYA	SUNGAI RAYA	1	3	6	4	6	5	66,86	11	5
25	SUNGAI RAYA	ARANG LIMBUNG	2	4	6	4	6	6	67,15	8	5
26	SUNGAI RAYA	KUALA DUA	3	3	6	4	6	2	61,85	31	5
27	SUNGAI RAYA	LIMBUNG	2	3	6	4	6	6	63,96	19	5
28	SUNGAI RAYA	TELUK KAPUAS	2	4	6	4	6	6	66,98	10	5
29	SUNGAI RAYA	PARIT BARU	2	3	6	4	6	5	66,85	12	5
30	SUNGAI AMBAWANG	JAWA TENGAH	2	4	6	4	6	5	65,31	17	5
31	SUNGAI AMBAWANG	AMBAWANG KUALA	2	4	6	4	6	6	67,02	9	5
32	SUNGAI AMBAWANG	MEGA TIMUR	1	3	6	4	6	4	60,95	35	5
33	SUNGAI AMBAWANG	TELUK BAKUNG	2	3	6	4	6	1	59,48	40	5
34	SUNGAI AMBAWANG	AMPERA RAYA	1	2	6	4	6	6	67,40	7	5
35	SUNGAI AMBAWANG	SUNGAI MALAYA	1	6	6	4	4	4	66,07	13	5

### Lampiran 7. Desa dengan Skala Prioritas Komposit 6

Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
SUNGAI KAKAP	PAL.IX	2	4	6	4	6	5	68,65	5	6
RASAU JAYA	RASAU JAYA I	2	5	6	4	6	6	68,80	4	6
SUNGAI RAYA	KAPUR	2	6	6	4	6	6	73,14	1	6
SUNGAI RAYA	MEKAR BARU	2	4	6	4	6	4	69,31	2	6
SUNGAI RAYA	SUNGAI RAYA DALAM	2	3	6	4	6	4	68,90	3	6